



LAPORAN KINERJA (LAKIN) 2019



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BANDUNG**

Jalan Raya Soreang KM. 17
(Komplek Pemerinta Kabupaten Bandung)
Soreang, Bandung 40911
Telp. (022) 5895905 Fax. (022) 5880882
Email. bps3204@bps.go.id

KATA PENGANTAR

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 pasal 18 yang menyebutkan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan, hal ini merupakan dasar penyampaian Laporan Kinerja (Lakin) BPS Kabupaten Bandung. Laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran strategis sesuai yang dituangkan dalam Rencana Strategis.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Lakin BPS Kabupaten Bandung Tahun 2019 ini disusun berdasarkan dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019 yang mengacu pada Rencana Strategis BPS Kabupaten Bandung Tahun 2015 – 2019.

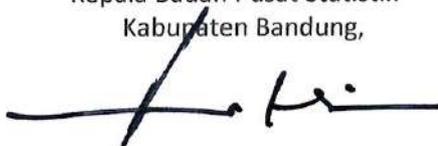
Laporan Kinerja (Lakin) BPS Kabupaten Bandung ini dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai:

1. Keberhasilan atau kegagalan kegiatan tahunan yang telah dilaksanakan.
2. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Kabupaten Bandung.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja (Lakin) ini hingga selesai kami ucapkan terima kasih. Kami juga mengaharapkan kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini di masa yang akan datang.

Soreang, 10 Februari 2020

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Bandung,



Agung Hartadi, SST, M.E.
N/P. 19750909 199403 1 001

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	i
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar.....	vi
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BPS Kabupaten Bandung	2
1.4. Sumber Daya Manusia (SDM) BPS Kabupaten Bandung.....	4
1.5. Potensi dan Permasalahan.....	11
1.6. Sistematika Penyajian Laporan	12
PERENCANAAN KINERJA.....	13
2.1. Rencana Strategis (Renstra) BPS Kabupaten Bandung 2015-2019	13
2.2. Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kabupaten Bandung 2019	19
3.1. Capaian Kinerja BPS Kabupaten Bandung Tahun 2019	26
3.2. Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran BPS Kabupaten Bandung 2015-2019	36
3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Capaian Tahun 2019	37
3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja BPS Kabupaten Bandung Tahun 2019 terhadap Target Akhir Rencana Strategis (Renstra) 2015- 2019	44
3.5. Kegiatan Prioritas BPS Kabupaten Bandung Tahun 2019	50
3.5.1 Pendataan Potensi Desa (PODES) Tahun 2019	51
3.5.2 Survei Penyusunan Disagregasi PMTB Menurut Institusi dan Lapangan Usaha.....	53
3.5.3 Survei Wisatawan Nusantara (WISNUS) Tahun 2019	55
3.5.4 Survei Statistik Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan	57
3.5.5 Pendataan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA).....	60
3.5.7 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2019	63
3.5.9 Kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilayah Kerja Statistik SP2020	68
3.6. Upaya Efisiensi BPS Kabupaten Bandung 2019.....	73
3.7. Kinerja Anggaran Tahun 2019.....	76
3.8. Penghargaan atas Prestasi yang diperoleh tahun 2019	89
PENUTUP.....	91
4.1. Tinjauan Umum.....	91
4.2. Tindak Lanjut.....	91
LAMPIRAN - LAMPIRAN	93
Lampiran 1. Rencana Strategis (Renstra) BPS Kabupaten Bandung 2015-2019	93
Lampiran 2. Pernyataan Perjanjian Kinerja BPS Kabupaten Bandung 2019.....	95

Lampiran 3. Pernyataan Perjanjian Kinerja BPS Kabupaten Bandung 2019 (Review).....	98
Lampiran 4. Rincian SDM ASN BPS Kabupaten Bandung akhir 2019	101
Lampiran 5. Jadwal Kegiatan Survei dan Pengolahan BPS Kabupaten Bandung 2019	102
Lampiran 6. Target – Realisasi Kegiatan/ <i>Response Rate</i> Survei dan Pengolahan BPS Kabupaten Bandung Tahun 2019	109
Lampiran 7. Judul Publikasi Yang Terbit Tahun 2019.....	114
Lampiran 8. Piagam Penghargaan yang diterima Tahun 2019.....	116

Daftar Tabel

Nomor dan Uraian Tabel

Tabel 1. Jumlah Rincian Pegawai BPS Kabupaten Bandung menurut Jabatan Struktural, Fungsional Umum dan Fungsional Statistisi	5
Tabel 2. Daftar Nama Staf/KSK/Mitra Statistik dan Jabatan Rangkap/Pelaksana Tugas	8
Tabel 3. Daftar Mutasi Pegawai BPS Kabupaten Bandung Tahun 2019.....	9
Tabel 4. Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Kabupaten Bandung 2015-2019.....	18
Tabel 5. Perjanjian Kinerja BPS Kabupaten Bandung 2019	21
Tabel 6. Kontribusi unit Eselon IV terhadap Penyusunan Target Indikator	23
Tabel 7. Capaian Kinerja Tujuan: Peningkatan Kualitas Data Statistik	27
Tabel 8. Capaian Kinerja Tujuan: Peningkatan Pelayanan Prima Hasil Kegiatan Statistik... 32	
Tabel 9. Capaian Kinerja Tujuan: Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik.....	34
Tabel 10. Capaian Kinerja Tujuan: Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaa birokrasi yang akuntabel.....	36
Tabel 11. Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2015-2019	37
Tabel 12. Capaian Kinerja Tujuan: Peningkatan Kualitas Data Statistik	38
Tabel 13. Capaian Kinerja Tujuan: Peningkatan Pelayanan Prima	40
Tabel 14. Capaian Kinerja Tujuan: Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik Tahun 2018-2019.....	42
Tabel 15. Capaian Kinerja Tujuan: Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang akuntabel Tahun 2018-2019	44
Tabel 16. Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019 Tujuan Peningkatan Kualitas Data Statistik terhadap Target Indikator Kinerja Renstra Tahun 2019	45
Tabel 17. Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019 Tujuan Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik terhadap Target Indikator Kinerja Renstra Tahun 2019..	47
Tabel 18. Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019 Tujuan Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik terhadap Target Indikator Kinerja Renstra Tahun 2019	48

Tabel 19. Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019 Tujuan Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang akuntabel terhadap Target Indikator Kinerja Renstra Tahun 2019	49
Tabel 20. Perbandingan Nilai Biaya Langganan Telpon per Tahun	74
Tabel 21. Rincian Revisi DIPA Anggaran Tahun 2019	75
Tabel 22. Perbandingan Pagu Anggaran	78
Tabel 23. Realisasi Penyerapan Anggaran dan Sisa Anggaran Tahun 2019 Menurut Program.....	79
Tabel 24. Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran 2018-2019 Menurut Program ...	80
Tabel 25. Realisasi Penyerapan Anggaran dan Sisa Anggaran Tahun 2019 Menurut Jenis Belanja.....	81
Tabel 26. Tingkat Efisiensi Anggaran berdasarkan Tingkat Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran terhadap Realisasi Anggaran BPS Kabupaten Bandung Tahun 2019	84
Tabel 27. Perubahan Bobot Penilaian Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA)	86
Tabel 28. Hasil Pengukuran Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA)	87
Tabel 29. Perbandingan Nilai Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA).....	88

Daftar Gambar Nomor dan Uraian

Gambar 1. Struktur Organisasi BPS Kabupaten Bandung	4
Gambar 2. Komposisi SDM BPS Kabupaten Bandung Menurut tingkat Pendidikan Pegawai	6
Gambar 3. Persentase Pegawai menurut Kelompok Umur	6
Gambar 4. Core Value BPS	17
Gambar 5. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Kabupaten Bandung.....	19
Gambar 6. Pembangunan Kerangka dan Arsitektur Bisnis Statistik.....	30
Gambar 7. Logo PST.....	31
Gambar 8. Persentase Pengguna Data Menurut Pekerjaan Utama Tahun 2019.....	33
Gambar 9. Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2015-2019.....	37
Gambar 10. Persentase Target - Realisasi Tujuan: Peningkatan Kualitas Data Statistik Tahun 2018-2019.....	39
Gambar 11. Persentase Target - Realisasi Tujuan: Peningkatan Pelayanan Prima Hasil Kegiatan Statistik Tahun 2018-2019	41
Gambar 12. Persentase Target Renstra 2019 dengan Realisasi 2019 Tujuan: Peningkatan Kualitas Data Statistik	46
Gambar 13. Kegiatan Pelaksanaan Pendataan Potensi Desa (PODES) BPS Kabupaten Bandung Tahun 2019	53
Gambar 14. Pencacahan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB Tahun 2019	54
Gambar 15. Kegiatan Pencacahan Survei Wisatawan Nusantara 2019	56
Gambar 16. Kegiatan Pelaksanaan Survei Pertanian Tanaman	58
Gambar 17. Kegiatan Pelaksanaan Pendataan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode KSA BPS Kabupaten Bandung Tahun 2019.....	62
Gambar 18. Kegiatan Pelaksanaan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).....	64
Gambar 19. Kegiatan Pelaksanaan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS	

Kabupaten Bandung Tahun 2019.....	67
Gambar 20. Kegiatan Pelatihan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilayah Kerja Statistik SP2020.....	70
Gambar 21. Komposisi Alokasi Anggaran Belanja BPS Kabupaten Bandung Tahun 2019 .	81
Gambar 22. Komposisi Realisasi Anggaran Jenis Belanja	82

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Kabupaten Bandung membutuhkan data statistik yang berkualitas, lengkap, akurat, relevan, mutakhir, dan berkesinambungan sebagai acuan dasar dalam perencanaannya. Guna mendukung hal tersebut BPS Kabupaten Bandung melakukan penyusunan perencanaan strategis untuk lima tahun, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 BPS Kabupaten Bandung. Hal ini bertujuan agar kegiatan perstatistikan yang dilakukan BPS selaras dengan arah dan tujuan RPJMN 2015-2019. Sebagai catatan, Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 BPS Kabupaten Bandung memasuki tahun terakhir pelaksanaan di tahun ini.

Dalam Renstra tersebut terdapat 4 (empat) tujuan strategis yang harus dicapai BPS pada tahun 2019 yaitu: (1) Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas; (2) Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik; (3) Penguatan Sistem Statistik Nasional (SSN) melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik; dan (4) Peningkatan birokrasi yang akuntabel.

Keseluruhan tujuan strategis tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam 9 sasaran strategis, yang masing-masing memiliki target indikator untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, sesuai amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, BPS Kabupaten Bandung menyusun dan menyajikan laporan kinerja yang merupakan gambaran kinerja atas prestasi kerja yang dicapai untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dan kinerja pencapaian target sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kabupaten Bandung Tahun 2019 yang ditetapkan setiap awal tahun

1.2. Maksud dan Tujuan

Selain untuk memenuhi kewajiban sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maksud penyusunan Laporan Kinerja BPS Kabupaten Bandung tahun 2019 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala BPS Kabupaten Bandung atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Selain itu penyusunan dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran BPS selama tahun 2019.

1.3. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BPS Kabupaten Bandung

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung merupakan lembaga non departemen/kementerian yang mempunyai kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi sebagai berikut:

- **Kedudukan**

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah;.

- (1). BPS Kabupaten/Kota adalah Perwakilan BPS di Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPS Propinsi.
- (2). BPS Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala

- **Tugas**

BPS Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- **Fungsi**

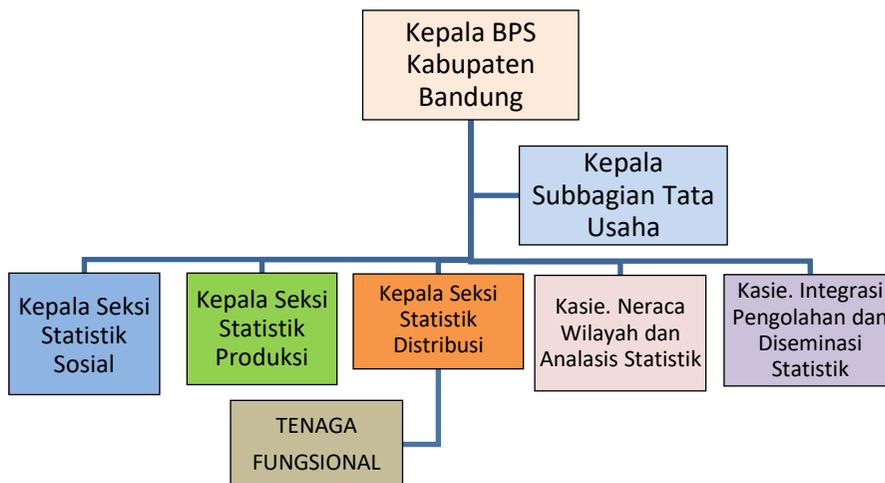
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kabupaten Bandung menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan statistik dasar di kabupaten;
- b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Kabupaten;
- c. Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik di kabupaten;
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BPS kabupaten.

- **Susunan Organisasi**

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah, telah ditentukan struktur organisasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, yaitu :

- a. Kepala;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kepala Seksi Statistik Sosial;
- d. Kepala Seksi Statistik Produksi;
- e. Kepala Seksi Statistik Distribusi;
- f. Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik;
- g. Kepala Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;



Gambar 1. Struktur Organisasi BPS Kabupaten Bandung

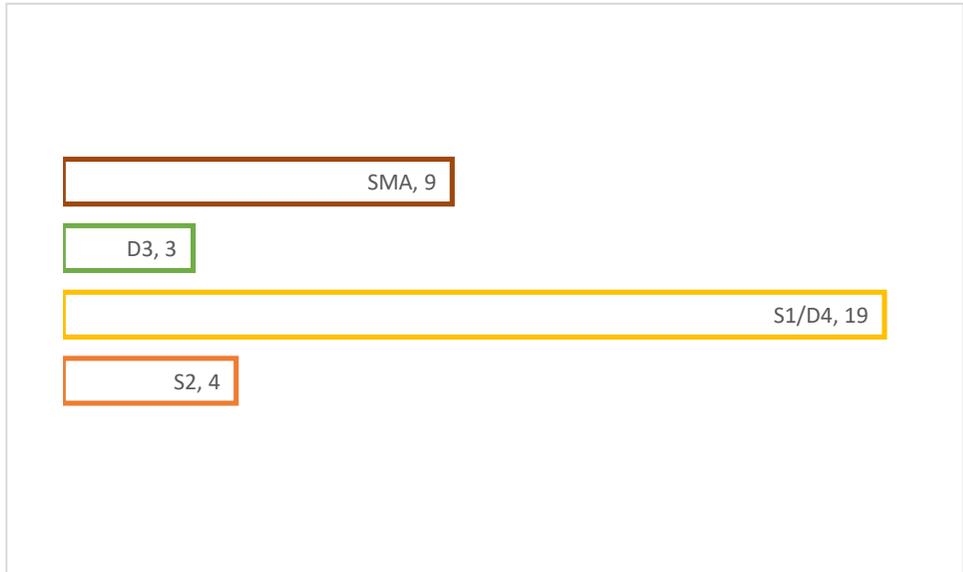
1.4. Sumber Daya Manusia (SDM) BPS Kabupaten Bandung

Dalam menunjang kegiatannya BPS Kabupaten Bandung di pimpin oleh seorang pejabat Struktural Eselon III/Administrator yang membawahi 5 (lima) Kepala Seksi dan 1 (satu) Kepala Subbagian atau membawahi 6 orang pejabat Struktural Eselon IV/Pengawas. Adapun Jumlah Pegawai non Struktural/Pelaksana sebanyak 28 orang, terdiri dari : 12 orang staf dan 16 orang Koordinator Statistik Kecamatan (KSK). Berdasarkan Jabatannya Pegawai non Struktural/Pelaksana terbagi dalam jabatan fungsional umum sebanyak 11 orang pegawai (29%) dan jabatan fungsional statistisi sebanyak 17 orang pegawai. Total pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) BPS Kabupaten Bandung sebanyak 35 orang ditambah dengan 5 orang pegawai non ASN/Honorar. Jumlah Pegawai ASN tahun ini berkurang 3 orang dibandingkan awal tahun , karena adanya mutasi pindah keluar satker.

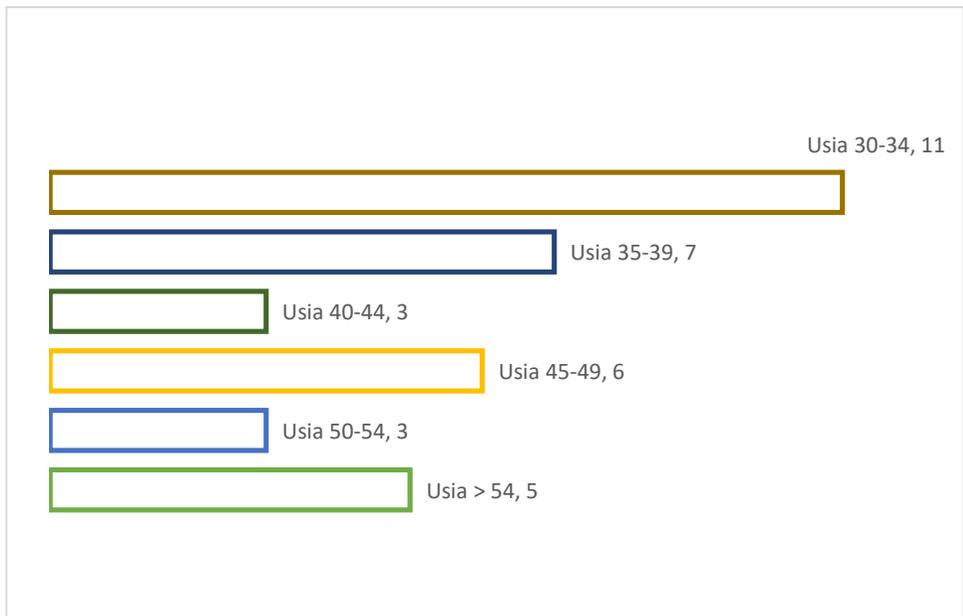
Tabel 1. Jumlah Rincian Pegawai BPS Kabupaten Bandung menurut Jabatan Struktural, Fungsional Umum dan Fungsional Statistisi

No	Jenis Jabatan	Jumlah (orang)
1	Administrator/Pejabat Eselon III	1
2	Pengawas/Pejabat Eselon IV	6
3	Staf Pelaksana Fungsional Umum	11
4	Staf Pelaksana Fungsional Tertentu/ Statistisi :	17
	- <i>Statistisi Terampil Pelaksana</i>	0
	- <i>Statistisi Mahir Pelaksana lanjutan</i>	4
	- <i>Statistisi Mahir Penyelia</i>	4
	- <i>Statistisi Ahli Pertama</i>	8
	- <i>Statistisi Ahli Muda</i>	1
J U M L A H		35

Ditinjau dari tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai di lingkungan BPS Kabupaten Bandung berlatar belakang pendidikan menengah dan tinggi. Sebanyak 4 orang pegawai (11%) berlatar belakang pendidikan magister (S-2), 19 orang pegawai (54%) dengan tingkat pendidikan sarjana atau Diploma IV (DIV/S-1), 3 orang pegawai (9%) dengan tingkat pendidikan diploma-3 (D-III), 9 orang pegawai (26%) berpendidikan SMA. Jumlah Pegawai berlatar belakang pendidikan magister (S-2) tahun ini bertambah 2 (dua) orang, karena adanya pegawai yang sudah selesai tugas belajar di ITB, yaitu an. Sdr. Nurdianto Zaenurdin dan adanya Pegawai Pindahan dari BPS Kabupaten Subang, Sdr. Peri Gandara.



Gambar 2. Komposisi SDM BPS Kabupaten Bandung Menurut tingkat Pendidikan Pegawai



Gambar 3. Persentase Pegawai menurut Kelompok Umur

Sementara jika dilihat berdasarkan kelompok umur, sebagian besar pegawai BPS Kabupaten Bandung berada pada kelompok umur di bawah 50 tahun yaitu sebanyak 27 orang atau sebesar 77 %. Hal ini menjadi potensi SDM yang menggembirakan karena secara fisik relatif muda sehingga memiliki potensi yang besar dalam rangka mendorong peningkatan kinerja satker BPS Kabupaten Bandung.

Dari sisi kekuatan lapangan, komposisi Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) sebagai tenaga lapangan di akhir tahun 2019 kembali mengalami penurunan sebanyak 3 (tiga) orang KSK dibandingkan jumlah KSK pada akhir tahun 2018, karena terjadi mutasi pindah keluar satker BPS kabupaten Bandung. Jumlah KSK definitif pada akhir tahun 2019 tercatat sebanyak 16 orang, dengan jumlah KSK aktif sebanyak 14 orang karena 2 orang KSK masih menjalani tugas belajar S-2.

Sebanyak 17 Kecamatan masih belum terisi posisi KSK definitif, diantaranya: Kecamatan Rancabali, Cimaung, Kertasari, Pacet, Cikancung, Nagreg, Solokan Jeruk, Canguang, Soreang, Cilengkrang, Cimenyan, Pasir Jambu, Paseh, Ciparay, Margaasih, Bojongsoang dan Katapang.

Kekosongan ini sangat terasa ketika menghadapi kegiatan-kegiatan besar yang memerlukan koordinasi dan melibatkan banyak petugas pendataan, seperti kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Wilayah Kerja Statistik SP2020 yang berlangsung di tengah tahun 2019.

Untuk mengantisipasi hal ini, strategi yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Bandung adalah (i) menugaskan beberapa KSK definitif untuk mengemban jabatan rangkap di kecamatan kosong, (ii) mengangkat beberapa pegawai staf pelaksana dan (iii) Mengangkat Mitra Statistik Kecamatan sebagai petugas pelaksana KSK pada beberapa kecamatan yang kosong. Rincian pembagian tugas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Daftar Nama Staf/KSK/Mitra Statistik dan Jabatan Rangkap/Pelaksana Tugas Tahun 2019

No	Nama	NIP/NIK	Gol.	Jabatan definitif	Jabatan rangkap/ Pelaksana Tugas
1	Indra	19820407 200604 1 010	II/d	Staf Statistik Produksi	KSK Majalaya
2	Dewi Rajaeti	19890327 201212 2 002	III/a	Staf Statistik Produksi	KSK Soreang
3	Ikin Sodikin	19730812 199403 1 004	III/c	KSK Pangalengan	KSK Cimaung
4	Cucu Hamzah Kurniadi, SAP	19690317 199403 1 002	III/b	KSK Cileunyi	KSK Cilengkrang
5	Hendra,S.Si	19861003 201003 1 002	III/c	KSK Ciwidey	KSK Rancabali
6	Irwan Nurdiansyah Z,A.Md	19861122 201003 1 002	III/a	KSK Cicalengka	KSK Nagreg
7	Syifa Insani, S.Si	19881203 201101 2 010	III/b	KSK Banjaran	KSK Canguang
8	Gandjar Wibawa	3204381504660005	-	Mitra Statistik	Plt. KSK Pasirjambu
9	Cucu May Sumarna	320410406780007	-	Mitra Statistik	Plt. KSK Kertasari
10	Jamiludin, SP	3204301001720008	-	Mitra Statistik	Plt. KSK Pacet
11	Ade Sobirin	3204330302580007	-	Mitra Statistik	Plt. KSK Solokan Jeruk
12	Irwan Purnama Ferdhyansyah, ST	3204253010770008	-	Mitra Statistik	Plt. KSK Cikancung
13	Agus Suhada	3273250908730004	-	Mitra Statistik	Plt. KSK Cimenyan
14	Nono	3204352810700001	-	Mitra Statistik	Plt. KSK Paseh

No	Nama	NIP/NIK	Gol.	Jabatan definitif	Jabatan rangkap/ Pelaksana Tugas
15	Aa Sodikin	3204102410650001	-	Mitra Statistik	Plt. KSK Margaasih

Pada tahun 2019 beberapa kali terjadi proses mutasi pada KSK, Staf dan Struktural di BPS Kabupaten Bandung, baik mutasi pindah antar satker, maupun promosi/naik jabatan serta pangkat/golongan. Jumlah KSK mengalami penurunan sebanyak 3 orang karena terjadi mutasi pindah keluar satker, sementara jumlah staf pelaksana di kantor BPS Kabupaten Bandung relatif tidak banyak mengalami perubahan sebanyak 12 orang, meskipun terjadi perubahan personil keluar masuk yang bersifat *cancel out*. Rincian para pegawai yang mengalami mutasi secara lengkap seperti pada tabel berikut.

Tabel 3. Daftar Mutasi Pegawai BPS Kabupaten Bandung Tahun 2019

No	Nama	NIP	Jabatan/ Pangkat Lama	Jabatan/ Pangkat Baru	TMT
1	Heri Susanto, S.Si	19811117 201212 1 002	KSK Margaasih, Kabupaten Bandung	KSK Langensari, Kota Banjar	01/01/2019
2	Bambang Ismail	19811117 201212 1 003	KSK Bojong Soang, Kabupaten Bandung	KSK Langensari, Kabupaten Tasikmalaya	01/02/2019
3	Listya Putri, A.Md	19880305 201101 2 019	Statistisi Pelaksana Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi statistik	Statistisi Pelaksana Lanjutan Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi statistik	01/02/2019
4	I n d r a	19820407 200604 1 010	Staf Seksi Statistik Produksi Kabupaten Bandung	KSK Majalaya, Kabupaten Bandung	01/03/2019
5	I n d r a	19820407 200604 1 010	Pengatur (II/c)	Pengatur Tingkat I (II/d)	01/04/2019
6	Dadan Somantri	19850628 200701 1 004	Juru (I/c)	Pengatur Muda (II/a)	01/04/2019
7	Syifa Insani, S.Si	19881203 201101 2 010	Penata Muda Tk I (III/b)	Penata (III/c)	01/04/2019

No	Nama	NIP	Jabatan/ Pangkat Lama	Jabatan/ Pangkat Baru	TMT
8	Dindin Budiman, SAP	19770916 199903 1 003	Penata Muda (III/a)	Penata Muda Tk I (III/b)	01/04/2019
9	Listya Putri, A.Md	19880305 201101 2 019	Pengatur Tingkat I (II/d)	Penata Muda (III/a)	01/04/2019
10	Ayi Ruskandar	19620521 199103 1 005	Penata Muda (III/a)	Penata Muda Tk I (III/b)	01/04/2019
11	Yudhi Suhendra, S.ST, MM	19710414 199102 1 001	Kepala Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi statistik Kabupaten Bandung	Kepala Seksi Statistik Produksi BPS Kota Cimahi	25/04/2019
12	Tutut Sudaryanti, S.ST	19730805 199512 2 001	Kepala Seksi Statistik Produksi Kabupaten Bandung	Kepala Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi statistik Kabupaten Bandung	25/04/2019
13	Didin Tajudin, SST, M.M.	197010051991021002	Kepala Subbagian Umum BPS Provinsi Jawa Barat	Kepala Seksi Statistik Produksi Kabupaten Bandung	25/04/2019
14	Peri Gandara, S.Si, M.Eng, MT	197502191996121001	Kepala Seksi Statistik Distribusi BPS Kabupaten Subang	Staf Seksi Statistik Distribusi BPS Kabupaten Bandung	01/05/2019
15	Nurdianto Zaenuridin, S.Si	19861012 201101 1 016	Staf Subbagian Tata Usaha/Tugas Belajar	Staf Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi statistik	01/08/2019
16	Dewi Rajaeti	19720126 199303 2 002	Staf Pelaksana Seksi Statistik Produksi	Statistisi Pelaksana lanjutan Seksi Statistik Produksi	01/09/2019
17	Dani Wildan Hakim, S.Si	19821116 201101 1 013	Penata Muda Tk I (III/b)	Penata (III/c)	01/10/2019
18	Cucu Rahmat Slamet, ST	19820218 200801 1 007	Statistisi Pertama/Staf Pelaksana Seksi Statistik Sosial	Kepala Seksi Statistik Sosial BPS Kabupaten Sumedang	01/11/2019
19	Derry Nugraha	19820812 200604 1 004	KSK Ciparay BPS Kabupaten Bekasi	KSK Bojongmangu BPS Kabupaten Bekasi	01/12/2019

1.5. Potensi dan Permasalahan

Kabupaten Bandung memiliki luas wilayah, jumlah kecamatan dan jumlah penduduk yang sangat besar. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi pelaksanaan perstatistikan di BPS Kabupaten Bandung.

Salah satu potensi yang dimiliki oleh BPS Kabupaten Bandung adalah kualitas SDM nya yang cukup baik, dimana sebagian besar pegawai di lingkungan BPS Kabupaten Bandung berlatar belakang pendidikan menengah dan tinggi.

Formasi Koordinator Statistik Kecamatan (KSK), yang merupakan ujung tombak dalam setiap kegiatan pendataan atau pencacahan, di BPS Kabupaten Bandung tercatat sebanyak 16 (enam belas) orang, dengan 14 (empat belas) KSK aktif lapangan. Formasi ini hanya dapat memenuhi sebagian dari total 31 (tiga puluh satu) kecamatan di Kabupaten Bandung. Karenanya, beberapa KSK kemudian mengemban jabatan rangkap dalam beberapa kegiatan besar. Selain itu kekurangan KSK sebagai koordinator pada tingkat kecamatan disiasati dengan pengangkatan beberapa pegawai staf pelaksana yang ada, ditambah dengan beberapa orang Mitra Statistik Kecamatan yang ditunjuk sebagai petugas pelaksana KSK. Dengan strategi yang dijalankan didukung dengan semangat *sabilulungan* maka kegiatan-kegiatan besar di BPS Kabupaten Bandung relatif dapat dilaksanakan dengan baik.

Selain itu, dalam menjalankan fungsi pembinaan dan koordinasi di bidang statistik, BPS Kabupaten Bandung telah menandatangani nota kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Bandung. Adanya payung hukum ini kemudian menjadi salah satu kekuatan (*strength*) yang dimiliki BPS Kabupaten Bandung dalam menyelenggarakan kegiatan perstatistikan terutama hubungannya terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Target pencacahan dan pemasukan dokumen semakin tinggi setiap tahunnya. Hal ini seiring dengan penggunaan data BPS Kabupaten Bandung yang semakin dibutuhkan oleh berbagai pihak. Disisi lain, responden semakin enggan untuk berpartisipasi secara mendalam pada sensus atau survei yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Bandung, menjadi salah satu kendala dalam memperoleh data yang berkualitas. Keakuratan

pengakuan dari sumber data menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin kualitas data statistik. Untuk mensiasati hal ini BPS Kabupaten Bandung gencar melakukan sosialisasi, harapannya agar masyarakat lebih mengenal BPS Kabupaten Bandung, sehingga ketika mereka menjadi responden sensus/survei BPS Kabupaten Bandung lebih kooperatif dalam memberikan jawaban apa adanya.

1.6. Sistematika Penyajian Laporan

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja BPS Kabupaten Bandung disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I. Pendahuluan, pada bab ini disajikan latar belakang; maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja; tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPS Kabupaten Bandung; sumber daya manusia di BPS Kabupaten Bandung, potensi dan permasalahan yang dihadapi BPS Kabupaten Bandung; serta sistematika penyajian laporan.
- Bab II. Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi Rencana Strategis (Renstra) BPS Kabupaten Bandung tahun 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kabupaten Bandung tahun 2019.
- Bab III. Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi Capaian Kinerja BPS Kabupaten Bandung tahun 2019, Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Bandung, Kegiatan Prioritas BPS Kabupaten Bandung tahun 2019, Upaya Efisiensi BPS Kabupaten Bandung tahun 2019, dan Realisasi Anggaran tahun 2019
- Bab IV. Penutup, pada bab ini berisi tinjauan umum dan saran tindak lanjut perbaikan untuk tahun berikutnya.

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (Renstra) BPS Kabupaten Bandung 2015-2019



BPS Kabupaten Bandung berupaya turut serta berkontribusi dalam pembangunan nasional di bidang statistik guna mendukung visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 yaitu **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Visi yang disusun BPS Kabupaten Bandung untuk mewujudkan kontribusi tersebut sebagaimana tercantum dalam Renstra 2015-2019 adalah:

“Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua”

“Pelopor” mempunyai makna bahwa BPS Kabupaten Bandung sebagai pencetus ide penyedia statistik terpercaya, sekaligus sebagai pelaku dalam penyediaan statistik terpercaya. ***“Data statistik yang terpercaya”*** yaitu statistik yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. ***“Untuk semua”*** dimaksudkan bahwa semua pihak mempunyai hak yang sama untuk mengakses data BPS (*impartial*) baik pengguna data nasional maupun internasional. Eksistensi BPS Kabupaten Bandung sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak.

Visi tersebut kemudian dirumuskan menjadi misi sebagai berikut:

1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional
2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional (SSN) yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik
3. Membangun insan statistik yang professional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

MISI 1

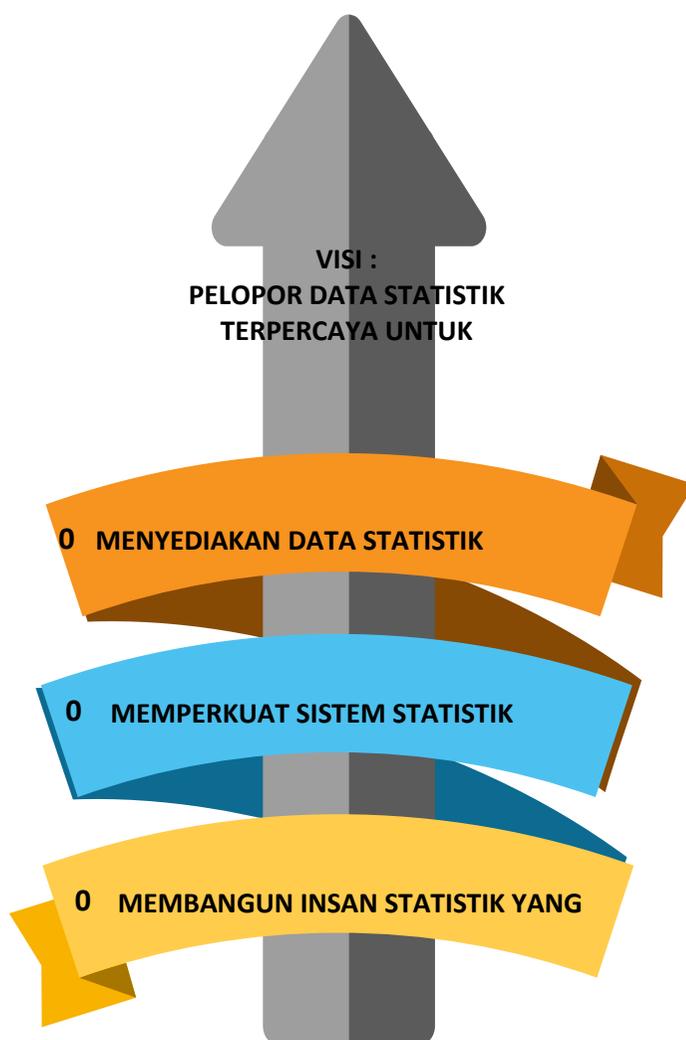
Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional

MISI 2

Memperkuat Sistem Statistik Nasional (SSN) yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik

MISI 3

Membangun insan statistik yang professional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.



Makna dari misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional.

Menyediakan data statistik bermakna bahwa Badan Pusat Statistik merupakan penyelenggara statistik dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat (Perpres No.86 tahun 2007).

Berkualitas berarti data statistik yang dihasilkan BPS memenuhi dimensi kualitas yakni relevan, akurat, disajikan tepat waktu, koheren, dapat diakses, dan dapat diinterpretasikan.

Melalui kegiatan statistik yang terintegrasi mengandung makna bahwa menyelenggarakan kegiatan statistik perlu lebih mengedepankan pendekatan fungsional, serta mengurangi pelaksanaan yang bersifat terkotak-kotak (*silo thinking*). Pendekatan fungsional berarti alur proses dari pengumpulan data, pengolahan data hingga diseminasi data dilakukan secara terintegrasi antar *subject matter*., atau terintegrasi juga berarti penyelenggaraan statistik yang dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan statistik, serta menghindari terjadinya duplikasi kegiatan". (UU no. 16 tahun 1997).

Berstandar internasional mengandung makna bahwa setiap penyelenggaraan kegiatan statistik, BPS Kabupaten Bandung akan selalu berpedoman kepada konsep, standar dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam *Fundamental Principle of Official Statistics*.

2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional (SSN) yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik

Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan mengandung makna bahwa Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam

penyelenggaraan statistik. Sistem Statistik Nasional perlu diwujudkan secara terus menerus dan berkelanjutan. (UU no. 16 tahun 1997).

Pembinaan dan koordinasi mengandung makna bahwa BPS memiliki mandat untuk melakukan pembinaan terhadap instansi lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral. BPS Kabupaten Bandung juga memiliki mandat untuk melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran ukuran. (UU no. 16 tahun 1997). Dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada khususnya, dan pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada umumnya, penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan kerjasama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik (PP No.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik). Dalam melakukan pembinaan statistik, BPS Kabupaten Bandung dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swasta, dan atau unsur masyarakat lainnya. Upaya pembinaan statistik yang dilakukan BPS sesuai PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, meliputi: (i) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan statistik; (ii) Pengembangan statistik sebagai ilmu; (iii) Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan statistik; (iv) Perwujudan kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan dan pengembangan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam kerangka semangat kerjasama dengan para penyelenggara kegiatan statistik lainnya; (v) Pengembangan sistem informasi statistik; (vi) Peningkatan penyebarluasan informasi statistik; (vii) Peningkatan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik untuk mendukung pembangunan nasional; (viii) Peningkatan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik. Koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik meliputi hal-hal yang berkaitan dengan: (i) Pelaksanaan kegiatan statistik; (ii) Pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran. Koordinasi dan atau kerjasama penyelenggaraan statistik antara BPS, instansi pemerintah, dan masyarakat dilaksanakan atas dasar

prinsip kemitraan. Koordinasi dan/atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik dilakukan dalam rangka membangun satu pusat rujukan informasi statistik nasional. Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik mencakup perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan/atau analisis statistik.

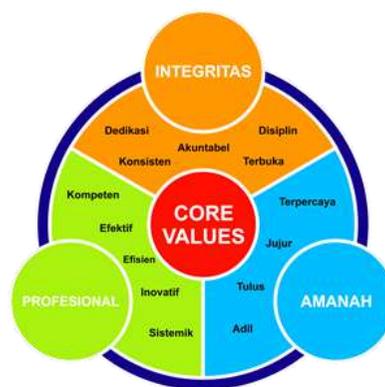
3. Membangun insan statistik yang professional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

Membangun insan statistik bermakna bahwa pembangunan insan statistik dilakukan untuk mewujudkan pengejawantahan nilai-nilai organisasi Badan Pusat Statistik, yakni **profesional, berintegritas dan amanah**.

Profesional mengandung makna bahwa dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik yang harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas.

BerIntegritas bermakna bahwa Insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan statistik harus memiliki integritas yaitu memiliki sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi/tugasnya seperti dedikasi (pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin (melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satunya kata dengan perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur)

Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran di dalam melaksanakan kegiatan statistik.



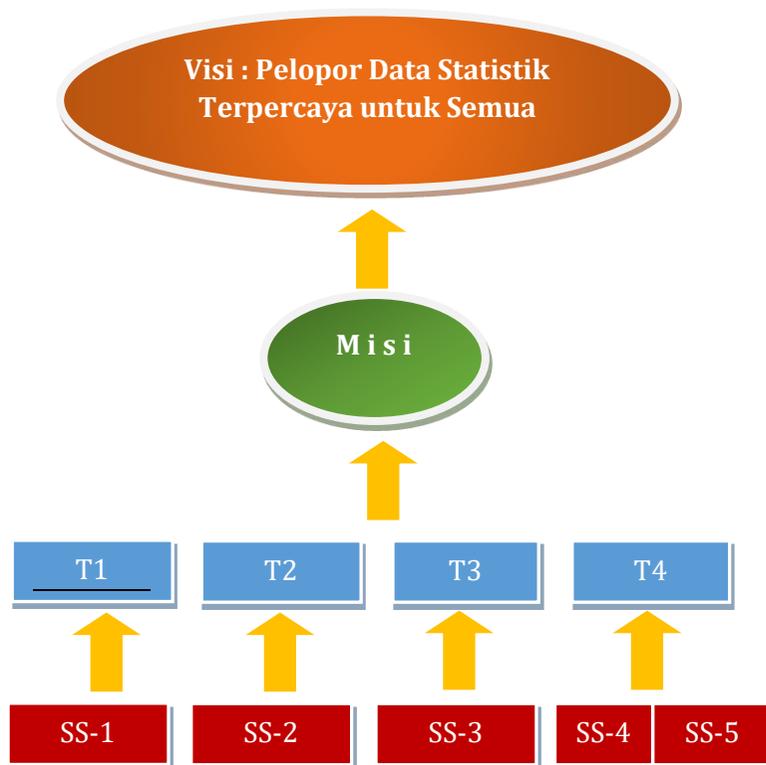
Gambar 4. Core Value BPS

Penetapan tujuan kemudian dirumuskan guna mendukung terwujudnya visi dan misi BPS Kabupaten Bandung. Masing-masing tujuan memiliki sasaran strategis pencapaian. Sasaran strategis dari masing-masing tujuan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Kabupaten Bandung 2015-2019

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS	
(1)		(2)	
T1. Peningkatan kualitas data statistik	SS1.	Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	
T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	SS2.	Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>user engagement</i>)	
T3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik	SS3.	Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN manajemen sumber daya manusia BPS	
T4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	SS4.	Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	
	SS5.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana BPS	

Masing-masing tujuan dan sasaran strategis pada tabel diatas memiliki indikator yang terukur agar dapat diketahui sejauh mana tingkat pencapaiannya. Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPS dapat dilihat pada gambar 6.



Gambar 5. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Kabupaten Bandung

2.2. Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kabupaten Bandung 2019

Pada setiap awal tahun ditetapkan target dari masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang harus dicapai selama setahun. Penetapan target tersebut tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Jika membandingkan Target pada Perjanjian Kerja awal tahun dengan *Review* Perjanjian Kerja akhir tahun, maka akan terdapat perbedaan karena adanya perubahan PAGU anggaran program dan perubahan pada target awal dan target *review* pada 2 (dua) indikator kinerja, dengan rincian sebagai berikut :

1. Penambahan PAGU pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL) dari awalnya Rp. 4.617.147.000,- menjadi Rp. 5.459.470.000,- . Hal ini disebabkan adanya kenaikan/inpassing gaji pegawai BPS Kabupaten Bandung, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019.
2. Penambahan PAGU pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA) dari awalnya Rp. 309.350.000,-menjadi Rp. 334.000.000,-. Hal ini dikarenakan adanya tambahan kebutuhan biaya untuk pemasangan meteran daya listrik di BPS Kabupaten Bandung.
3. Pengurangan PAGU pada Program Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) dari awalnya Rp. 7.953.520.000,-menjadi Rp. 7.812.354.000,-. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan selfblocking/penghematan anggaran.
4. Perubahan Target Indikator “Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu” dari 90 laporan/publikasi menjadi 35 laporan/publikasi karena jumlah laporan/publikasi yang wajib dimasukkan ke dalam Target Perjanjian Kinerja adalah hanya publikasi yang masuk ke dalam daftar publikasi *Advance Release Calender* (ARC) atau senarai rencana terbit publikasi di masing-masing Kabupaten/Kota
5. Perubahan Target Indikator “Persentase pemasukan dokumen (*respon rate*) Survei” dari 95,76% menjadi 98,24%, karena terjadi perubahan target respon rate dengan pendekatan survei usaha (88,35% menjadi 93,59%), dan pendekatan survei usaha non rumah tangga non usaha (99,95% menjadi 99,52%). Hal ini disebabkan karena terjadinya Perubahan sampel kegiatan pada Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS), antara lain karena :
 - a. Adanya penambahan sampel survei akibat adanya penambahan komponen kegiatan yang sebelumnya tidak ada, yaitu : Survei Penyusunan Nilai Tambah Lapangan Usaha Barang Triwulanan 2010:100 (SKTNP Barang), Implementasi SEEA Dalam Sisnerling Indonesia, Penyusunan Neraca Rumah Tangga Dan Institusi Nirlaba, Penyusunan Neraca Pemerintah Dan Badan Usaha;

- b. Adanya pengurangan sampel survei akibat adanya pengurangan komponen kegiatan yang sebelumnya ada, yaitu : Pengembangan Data Hortikultura Potensi Dengan Menggunakan Frame ST2013 Per Komoditas Per Rumah Tangga:
- c. Adanya Penambahan Sampel pada komponen Kegiatan yang sudah ada, seperti : Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi Dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA) ditambah sampel Komoditas Jagung

Adapun Target Perjanjian Kinerja tahun 2019 setelah *review* secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja BPS Kabupaten Bandung 2019

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Peningkatan kualitas data statistik	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	90,00
1.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	90,00
	Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	Persen	65,00
	Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	Persen	100,00
	Jumlah Release Data yang tepat waktu	Aktivitas	0
	Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu	Publikasi/Laporan	35
	Jumlah Publikasi/Laporan Sensus yang terbit tepat waktu	Publikasi/Laporan	1
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei		
- Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survey dengan pendekatan rumahtangga	Persen		100,00
- Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survey dengan pendekatan usaha	Persen		93,59
- Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survey dengan pendekatan non rumahtangga non usaha	Persen		99,52

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS	Persen	85,00
2.1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>user engagement</i>)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS	Pengunjung	26.000
	Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	85,00
	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS	Persen	35,00
3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	Metadata	12
3.1. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN manajemen sumberdaya manusia BPS	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	Metadata	12
4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Point	60
4.1 Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Point	60
	Jumlah Satker BPS Kabupaten / Kota Yang Berpredikat WBK/WBBM	Satker	0
4.2 Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS	Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	Persen	75
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan	Persen	100

Program	Anggaran
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS	Rp. 5.459.470.000,-
2. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Rp. 7.812.354.000,-
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS	Rp. 334.000.000,-

Realisasi dari target perjanjian kinerja tersebut dimonitoring secara terus menerus secara berkala setiap triwulanan, kemudian dilaporkan menjadi laporan interim (triwulanan) dan pada akhir tahun dilaporkan menjadi laporan kinerja. Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian target menjadi tanggung jawab Kepala BPS Kabupaten Bandung atas penggunaan anggaran BPS.

Perjanjian Kinerja yang disusun selanjutnya diturunkan ke dalam perjanjian kinerja pada tingkat Eselon IV (kepala seksi dan kepala subbagian). Karena itu untuk setiap seksi dan subbagian mempunyai kontribusi terhadap penyusunan target kinerja BPS Kabupaten Bandung. Peranan masing-masing unit kerja Eselon IV pada setiap penyusunan target indikator dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Kontribusi unit Eselon IV terhadap Penyusunan Target Indikator

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tata Usaha	Statistik Sosial	Statistik Distribusi	Statistik Produksi	Nerwallis	IPDS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Peningkatan kualitas data statistik	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik		*	*	*	*	*
1.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik		*	*	*	*	*
	Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama		*	*	*	*	*
	Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS						*

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tata Usaha	Statistik Sosial	Statistik Distribusi	Statistik Produksi	Nerwallis	IPDS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Release Data yang tepat waktu		*	*	*	*	*
	Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu		*	*	*	*	*
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei						
	- Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survey dengan pendekatan rumah tangga		*	*	*	*	*
	- Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survey dengan pendekatan usaha			*	*	*	*
	- Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survey dengan pendekatan non rumah tangga non usaha		*	*	*	*	*
2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS						*
2.1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>user engagement</i>)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS						*
	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS	*	*	*	*	*	*
	Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional						*
3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun						*
3.1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN manajemen sumberdaya manusia BPS	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun						*

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tata Usaha	Statistik Sosial	Statistik Distribusi	Statistik Produksi	Nerwallis	IPDS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	*	*	*	*	*	*
4.1 Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	*	*	*	*	*	*
	Jumlah Satker BPS Kabupaten / Kota Yang Berpredikat WBK/WBBM	*	*	*	*	*	*
4.2 Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS	Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	*					
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan	*					

Keterangan : :Penanggungjawab * : Kontributor

Keberhasilan pencapaian target kinerja sangat didukung oleh anggaran yang diberikan untuk satker BPS Kabupaten Bandung. Bentuk dukungan penganggaran tersebut diwujudkan melalui 3 (tiga) program kegiatan yang berada di BPS Kabupaten Bandung, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis Lainnya (DMTTL)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA)
3. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS).

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja BPS Kabupaten Bandung Tahun 2019

Capaian kinerja BPS Kabupaten Bandung 2019 merupakan pencapaian dari indikator-indikator tujuan dan sasaran strategis selama tahun 2019. Capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target PK (Perjanjian Kinerja) tahun 2019 yang telah ditetapkan pada awal tahun. Capaian kinerja dari masing-masing tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat pada ulasan berikut.

Capaian Kinerja Tujuan Pertama

Tujuan pertama adalah “Peningkatan kualitas data statistik”, diukur dengan indikator Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik. Tujuan pertama dicapai melalui sasaran strategis, meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS. Capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tujuan pertama yaitu peningkatan kualitas data statistik, telah tercapai dengan tingkat capaian kinerja sebesar 111,11 persen dengan rata-rata capaian indikator sasaran strategis tujuan pertama sebesar 104,66 persen. Meskipun tingkat capaian sudah di atas 100 persen, namun jika dilihat dari masing-masing indikator, masih terdapat indikator sasaran strategis yang menunjukkan capaian kerjanya kurang dari 100 persen, yaitu indikator sasaran persentase pemasukan dokumen (*response rate*) survey sebesar 96,88%, khususnya untuk rincian sasaran berikut :

- Persentase pemasukan dokumen (*response rate*) survei dengan pendekatan rumah tangga tercapai 92,28 persen,
- Persentase pemasukan dokumen (*response rate*) survei dengan pendekatan usaha tercapai 97,76 persen

Tabel 7. Capaian Kinerja Tujuan: Peningkatan Kualitas Data Statistik

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Peningkatan kualitas data statistik				
Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	90,00	100,00	111,11
1.1.Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS				
Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	90,00	100,00	111,11
Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	Persen	65,00	100,00	120,00
Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	Persen	100,00	100,00	100,00
Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu	Laporan/ publikasi	35	35	100,00
Jumlah Publikasi/Laporan Sensus yang terbit tepat waktu	Laporan/ publikasi	1	1	100,00
Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei	Persen	98,24	95,17	96,88
Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan rumah tangga	Persen	100	92,28	92,28
Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan usaha	Persen	93,58	91,49	97,76
Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	Persen	99,51	99,61	100,09
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran				104,66

Beberapa penyebab persentase pemasukan dokumen (*response rate*) survei dengan pendekatan rumah tangga belum 100 persen respon, antara lain :

1. Responden Rumahtangga sampel pada saat pendaftaran rumahtangga tercatat, sedang pada waktu pencacahan sampel berpindah alamat.
2. Responden Rumahtangga sampel belum dapat ditemui di tempat tinggalnya sampai batas waktu survei yang ditentukan.
3. Responden Rumahtangga sampel enggan (*resistensi*) memberikan jawaban sampai batas waktu survei yang ditentukan.

Adapun beberapa penyebab persentase pemasukan dokumen (*response rate*) survei dengan pendekatan usaha belum bisa mencapai target, diantaranya adalah :

1. Adanya pergantian manajemen/pengurus pada perusahaan-perusahaan responden yang biasa menangani pengisian kuesioner survei BPS. Hal ini seringkali terjadi pada sampel perusahaan Industri Besar-Sedang, baik Triwulanan atau Tahunan.
2. Perusahaan responden pada saat dicacah tutup, baik tutup sementara maupun tutup permanen.
3. Perusahaan responden berpindah alamat ke luar kabupaten .
4. Perusahaan responden berganti jenis usaha.
5. Skala Usaha Perusahaan responden berubah menjadi kecil (di luar cakupan survei).
6. Perusahaan responden berganti kepemilikan usaha.
7. Perusahaan responden yang terdapat pada daftar sampel tidak ditemukan (alamat perusahaan tidak sesuai). Hal ini banyak terjadi pada sampel perusahaan konstruksi
8. Jenis usaha Perusahaan responden yang terdapat pada daftar sampel , pada saat pencacahan tidak sesuai dengan jenis sampel usaha yang dimaksud pada survei bersangkutan (di luar cakupan survei).
9. Responden belum dapat mengisi kuesioner survei BPS dengan lengkap sesuai permintaan survei yang bersangkutan setelah dikembalikan ke responden oleh petugas
10. Responden belum mengisi kuesioner survei BPS sampai batas waktu survei yang ditentukan

Meskipun capaian tujuan pertama telah relatif tinggi, namun upaya peningkatan kualitas data statistik harus terus dilakukan oleh BPS Kabupaten Bandung. BPS Kabupaten Bandung secara internal untuk pegawai atau petugas telah melakukan beberapa hal untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satunya adalah dengan memaksimalkan peran Tim Pelaksana khususnya Pilar Penataan Tata Laksana. Tim ini bertugas untuk memastikan apakah proses pengumpulan data yang dilakukan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) atau buku pedoman yang digunakan sebagai panduan dalam pengumpulan data dari survei bersangkutan.

Dalam rangka peningkatan kualitas data yang dihasilkan, kepada para petugas sebelum melakukan pendataan telah dibekali dengan pengetahuan dan pelatihan, agar lebih mahir dalam menggali informasi dari responden. Petugas juga dituntut untuk terus menjalin hubungan yang baik dengan responden sebagai sumber data melalui pendekatan kekeluargaan dalam melakukan wawancara. Selain itu berbekal pengetahuan dan pengalaman yang telah diajarkan, petugas senantiasa diingatkan bahwa dalam melakukan pendataan di lapangan, agar selalu memperhatikan konsistensi dan koherensi dari data yang dikumpulkan karena adanya keterkaitan antara data yang satu dengan data lainnya.

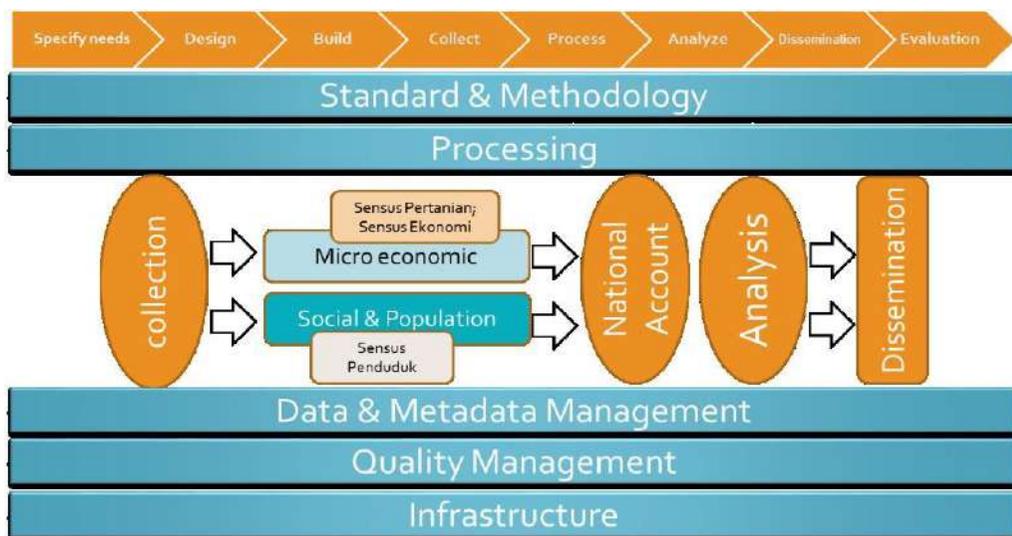
Peningkatan kualitas data juga dilakukan dengan lebih mengaktifkan peran para pengawas serta petugas supervisi dengan memastikan pemeriksaan penjaminan mutu dan kualitas lapangan terlaksana dengan baik. Sehingga perbaikan yang dilakukan pada tahap editing-coding dan pengolahan dokumen pencacahan dapat diminimalisir.

Untuk melengkapi kegiatan di atas, setiap penanggungjawab kegiatan juga telah melakukan monitoring kualitas. Monitoring kualitas atau pengendalian kualitas dibuat pada saat kegiatan sedang berlangsung yang bertujuan untuk menjaga kualitas hasil dari kegiatan yang sedang dilaksanakan serta untuk mengetahui sedini mungkin kesalahan yang terjadi baik dari sisi cakupan (*coverage*) maupun isi (*content*) data yang dikumpulkan. Hasil dari kegiatan ini selanjutnya tertuang dalam bentuk dokumen pengendalian proses kegiatan.

Dalam rangka peningkatan kualitas data dan percepatan proses pengumpulan

data, beberapa Kegiatan Survei pada tahun 2019 sudah mulai menggunakan mode wawancara tanpa kertas (*paperless*), dengan mode CAPI (Computer Assist Personal Interviewing) menggunakan gadget atau HP Android menggunakan, seperti : SHOPI (Survei Hortikultura Potensi), SPAK (Survei Perilaku Anti Korupsi), BCS (*Bussiness Characteristic Survey*) dan Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi Dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA). Kelebihan dengan mode CAPI ini selain menghemat penggunaan kertas, tingkat kesalahan pengisian di lapangan akan langsung terdeteksi secara dini melalui saringan *rule validasi* yang terdapat pada aplikasi survei yang bersangkutan, sehingga akan mempercepat proses pengolahan data.

Upaya peningkatan kualitas data di BPS, selain melalui pendekatan dengan seluruh *stakeholder* dan responden sebagai objek survei yang terus menerus, saat ini usaha lain yang sedang dan terus dilakukan BPS adalah melalui pembenahan tata laksana (*bussiness process reengineering*) dan pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk berbagai kegiatan survei dengan tujuan membentuk Kerangka dan Arsitektur Bisnis Statistik yang lebih terintegrasi. Rancangan dari Kerangka dan Arsitektur Bisnis Statistik 2016-2019 (*Statistical Business Framework and Architecture – SBFA*) dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 6. Pembangunan Kerangka dan Arsitektur Bisnis Statistik

Kebutuhan untuk memproduksi Statistik Neraca Nasional menjadi prioritas dalam kerangka pembenahan proses bisnis survei-survei yang ada di BPS. Kerangka pembenahan juga memperhatikan kerangka kebutuhan infrastruktur statistik korporat untuk mendukung semua proses yang diidentifikasi di dalam model. Di dalam SBFA ini dituangkan semua kebutuhan perubahan bisnis yang diperlukan, kerangka infrastruktur statistik, manajemen data dan metadata, kebutuhan sistem-sistem yang terintegrasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis yang dibangun, kebutuhan penyalarsan organisasi agar mendukung perubahan proses bisnis yang terjadi dan kebutuhan kompetensi SDM untuk menjamin perubahan bisnis tersebut dapat dilaksanakan oleh pegawai BPS sesuai yang ditetapkan.

Capaian Kinerja Tujuan Kedua

Tujuan kedua adalah peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik yang diukur dengan indikator Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS. Tujuan ini dicapai dengan satu sasaran strategis, yaitu meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (*User Engagement*).

Tujuan kedua diwujudkan melalui Pelayanan Statistik Terpadu (PST). Moto yang diterapkan dalam PST adalah melayani dengan hati. BPS meraih predikat patuh terhadap UU Pelayanan Publik. Menurut Ombudsman pelayanan publik BPS telah berada pada zona hijau atau tingkat kepatuhan tinggi.



Gambar 7. Logo PST

Adapun layanan data yang disediakan oleh BPS terdiri atas:

1. Layanan konsultasi dan rekomendasi kegiatan statistik;
2. Layanan konsultasi pengguna data;
3. Layanan perpustakaan tercetak;
4. Layanan perpustakaan digital melalui Web BPS;
5. Layanan data mikro/peta digital/softcopy publikasi.

Setiap permintaan data akan dilayani sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis “peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik” tersebut dapat dilihat pada tabel 8 berikut

Tabel 8. Capaian Kinerja Tujuan: Peningkatan Pelayanan Prima Hasil Kegiatan Statistik

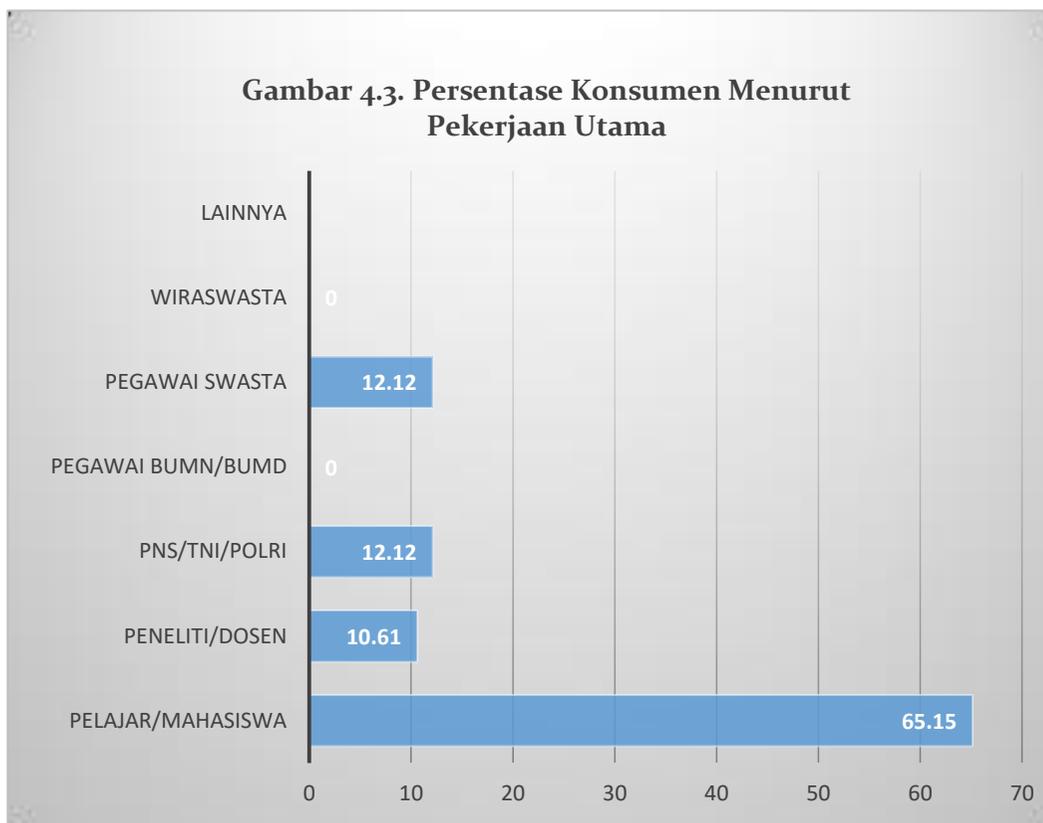
Sasaran Strategis/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik				
Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS	Persen	85,00	93,94	110,52
2.1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>User Engagement</i>)				
Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i> BPS	Pengunjung	26.000	23.558	90.60
Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	35	100	120
Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS	Persen	85	85,35	100,41
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran				103,67

Pencapaian tujuan kedua tercatat diatas 100 persen atau sebesar 110,52 persen, secara keseluruhan rata-rata capaian indikator sasaran memiliki nilai yang cukup baik, yaitu sebesar 103,67 persen .

Pencapaian tertinggi berada pada indikator persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional sebesar 120%. Hasil Survei Kepuasan Data (SKD) tahun 2019, yang dilaksanakan di BPS Kabupaten Bandung pada tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan 24 Juni 2019,

menunjukkan sebanyak 100 persen konsumen data menggunakan Data BPS sebagai Rujukan Utama dan Perencanaan Evaluasi Pembangunan Nasional.

Sebanyak 65,15 persen dari total responden SKD 2019 merupakan Pelajar atau Mahasiswa yang menggunakan data BPS sebagai rujukan untuk membuat tugas sekolah maupun untuk menyusun tugas akhir dari skripsi. Sementara sekitar 12,12 persen PNS/TNI/POLRI dan 12,12 persen Pegawai Swasta menggunakan data BPS sebagai bahan dalam penentuan kebijakan sektoral. Adapula sisanya sebanyak 10,61 persen merupakan Peneliti/Dosen sebanyak 10.61 persen menggunakan data BPS sebagai data tambahan untuk penelitian



Gambar 8. Persentase Pengguna Data Menurut Pekerjaan Utama Tahun 2019

Capaian Kinerja Tujuan Ketiga

Tujuan ketiga adalah Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang Statistik dengan sasaran strategis adalah meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) dan manajemen sumberdaya manusia BPS. Seluruh metadata statistik sektoral yang menjadi target BPS Kabupaten Bandung pada tahun 2019, dengan berkoordinasi dengan pimpinan dinas/instansi/lembaga terkait dapat dikumpulkan dan diolah dengan baik oleh para petugas yang bersangkutan. Capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut tercapai dengan baik yaitu sebesar 120 persen seperti yang dapat dilihat pada tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9. Capaian Kinerja Tujuan: Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik

Sasaran Strategis/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik				
Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	Metadata	12	20	120
3.1 Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN				
Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	Metadata	12	20	120
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran				120

Capaian Kinerja Tujuan Keempat

Tujuan keempat adalah peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang akuntabel, tujuan ini diukur dengan Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Sasaran strategis pada tujuan ketiga adalah: (i) Meningkatnya birokrasi yang akuntabel dan (ii) Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana BPS.

Penilaian SAKIP meliputi 5 (lima) komponen besar yang menjadi objek evaluasi dari Inspektorat BPS. Kelima komponen besar tersebut meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Masing-masing komponen mempunyai bobot penilaian yang beragam. Dari total bobot (100), komponen perencanaan kinerja mempunyai bobot (30), komponen pengukuran kinerja mempunyai bobot (25), pelaporan kinerja mempunyai bobot (15), evaluasi kinerja mempunyai bobot (10) dan capaian kinerja mempunyai bobot (20).

Capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel 10. Nilai Capaian Kinerja tujuan keempat BPS Kabupaten Bandung mencapai 102,23 persen. Seluruh indikator terlihat mencapai 100 persen, bahkan ada yang lebih. Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat tercatat sebesar 61,34 melampaui target 2019 sebesar 60. Begitu pula untuk sasaran strategis meningkatnya kualitas sarana dan prasarana BPS yang mencapai target 100 persen untuk kedua indikatornya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan sasaran strategis tujuan keempat dapat tercapai dengan baik. Sebagai catatan pada tahun ini nilai SAKIP BPS Kabupaten Bandung meningkat cukup tinggi yaitu sebesar 2.43 poin atau dari 58.91 (2018) menjadi 61.34 (2019). Hal ini cukup membanggakan karena dari predikat CC menjadi predikat B

Walaupun demikian, seluruh jajaran BPS Kabupaten Bandung tetap berkomitmen untuk terus berusaha dalam meningkatkan kinerja dan kelengkapan bukti-bukti/dokumentasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja dari setiap tahapan, baik Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja maupun

Laporan Pencapaian Sasaran/Kinerja untuk meningkatkan nilai/point penilaian SAKIP di tahun-tahun yang akan datang.

Tabel 10. Capaian Kinerja Tujuan: Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang akuntabel

Sasaran Strategis/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang akuntabel				
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Point	60	61,34	102,23
4.1 Meningkatnya birokrasi yang akuntabel				
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Persen	60	61,34	102,23
Jumlah Satker BPS Kabupaten / Kota Yang Berpredikat WBK/WBBM	satker	0	0	0
4.2 Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana BPS				
Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	Persen	75,00	86,36	115,15
Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan	Persen	100,00	100,00	100,00
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran				105,79

3.2. Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran BPS Kabupaten Bandung 2015-2019

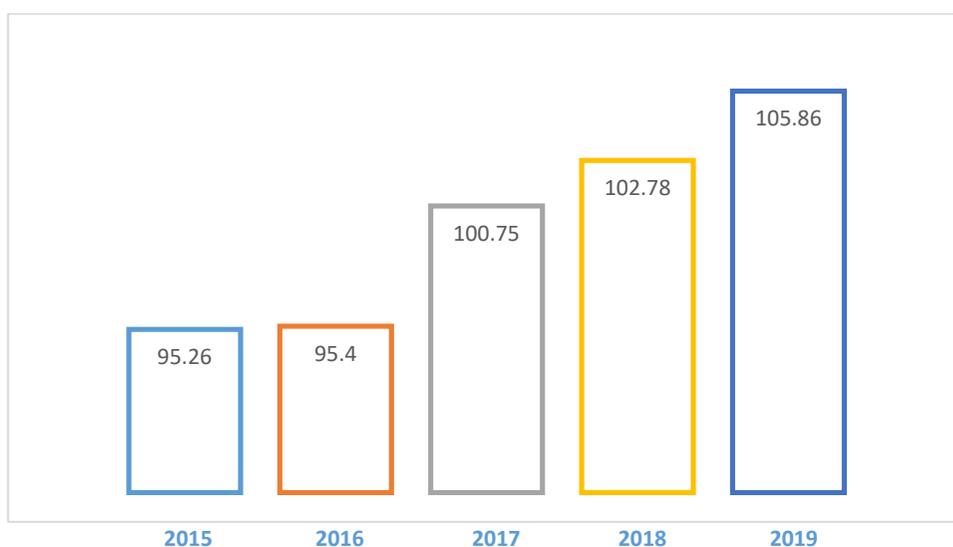
Tahun 2019 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Renstra 2015-2019. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, terlihat tren kenaikan dalam pencapaian setiap tahunnya.

Secara umum rata-rata capaian kinerja sasaran strategis menunjukkan adanya peningkatan kinerja dari tahun ke tahun. Capaian kinerja sasaran pada tahun 2019 tercatat sebesar 105,86, mengalami peningkatan 10,60 poin dibandingkan dengan tahun 2015 yang merupakan tahun awal berlakunya Renstra 2015-2019.

Tabel 11. Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Sasaran	95,26	95.40	100,75	102,78	105,86

Namun meskipun capaian kinerja mengalami *trend/kecenderungan* kenaikan yang positif, BPS Kabupaten Bandung terus berkomitmen berupaya keras untuk meningkatkan kinerjanya dari tahun ke tahun, terutama upaya peningkatan pada indikator-indikator sasaran yang masih memiliki nilai relatif masih rendah atau di bawah target.



Gambar 9. Perkembangan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2015-2019

3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Capaian Tahun 2019

Pada Tabel 12 di bawah ini dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Tujuan Pertama yaitu **Peningkatan Kualitas data Statistik** yang diukur dengan indikator *Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik* sebesar terjadi peningkatan sebesar 1,91 %, meskipun capaian kinerjanya pada kedua tahun tersebut masih tetap tercapai di atas target 100 %.

Apabila dilihat lebih jauh lagi pada Sasaran Strategis **Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS**, 3 (tiga) indikator sasaran mengalami peningkatan capaian kinerja, yaitu : *Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik (1,91%)* , *Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utam (6,15%)*, dan *Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei (2,07%)*. Sedangkan pada 3 (tiga) indikator sasaran lainnya, yaitu : *Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS*, *Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu* dan *Jumlah Publikasi/Laporan Sensus yang terbit tepat waktu* tidak mengalami penurunan atau pun kenaikan, masih tetap mencapai target sebesar 100%. Rata-Rata Capaian Indikator Sasaran tujuan pertama mengalami peningkatan sebesar 1,69 %. Dari nilai pada tahun 2018 sebesar 102,98% menjadi 104,66 % pada tahun 2019.

Tabel 12. Capaian Kinerja Tujuan: Peningkatan Kualitas Data Statistik Tahun 2018-2019

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Capaian Kinerja 2018 (%)	Capaian Kinerja 2019 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Peningkatan kualitas data statistik			
Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	109,20	111,11
1.1.Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS			
Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	109,20	111,11
Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	Persen	113,85	120,00
Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	Persen	100,00	100,00
Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu	Laporan/ publikasi	100.00	100.00
Jumlah Publikasi/Laporan Sensus	Laporan/	100.00	100.00

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Capaian Kinerja 2018 (%)	Capaian Kinerja 2019 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
yang terbit tepat waktu	publikasi		
Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei	Persen	94,81	96,88
Rata-Rata Capaian Indikator Sasaran		102,98	104,66

Pada gambar 10 di bawah ini terlihat bahwa apabila membandingkan antara persentase Target dengan Realisasi pada Tujuan Pertama yaitu **Peningkatan Kualitas data Statistik** dengan Indikator *Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik*, baik pada tahun 2018 maupun 2019 telah melebihi target yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan, yaitu masing-masing target sebesar 90% dengan realisasi masing-masing 98.31 % dan 100,00 %. Realisasi pada tahun 2018 telah melebihi target sebesar 8,31 %, sedangkan pada tahun 2019 telah melebihi target sebesar 10,00 %.



Gambar 10. Persentase Target - Realisasi Tujuan: Peningkatan Kualitas Data Statistik Tahun 2018-2019

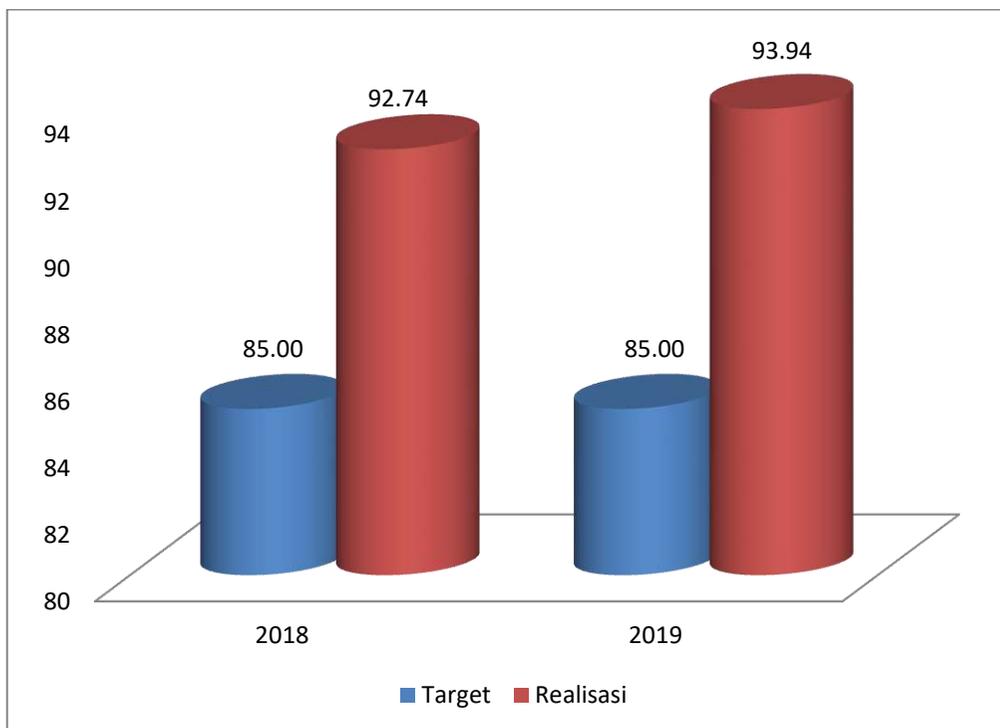
Capaian Kinerja Tujuan kedua, yaitu **Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik** yang diukur dengan Indikator *Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS* mengalami peningkatan sebesar 1.42 % dari capaian kinerja sebelumnya pada tahun 2018 sebesar 109,10 % menjadi 110,52 % pada tahun 2019.

Tabel 13. Capaian Kinerja Tujuan: Peningkatan Pelayanan Prima Hasil Kegiatan Statistik Tahun 2018-2019

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Capaian Kinerja 2018 (%)	Capaian Kinerja 2019 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik			
Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS	Persen	109,10	110,52
2.1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>User Engagement</i>)			
Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i> BPS	Pengunjung	120,00	90,61
Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS	Persen	103,70	100,410
Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	73,71	120,00
Rata-Rata Capaian Indikator Sasaran		99,13	103,67

Perbandingan antara persentase Target dengan Realisasi pada Tujuan kedua, yaitu **Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik** yang diukur dengan Indikator *Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS*, baik pada tahun 2018 maupun 2019 telah melebihi target yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan, yaitu masing-masing target sebesar 85% dengan realisasi masing-masing 92,74 % dan 93,94 %. Realisasi pada tahun 2018 telah melebihi target sebesar 7,74 %,

sedangkan pada tahun 2019 telah melebihi target sebesar 8,94 %, sebagaimana terlihat pada gambar 11 di bawah ini.



Gambar 11. Persentase Target - Realisasi Tujuan: Peningkatan Pelayanan Prima Hasil Kegiatan Statistik Tahun 2018-2019

Hasil Capaian kinerja Sasaran Strategis pada tujuan yang kedua, yaitu ***Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (User Engagement)*** berdasarkan indikator sasarannya didapatkan bahwa dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan capaian kinerja untuk 2 indikator sasaran yaitu *Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS* dan indikator sasaran *Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS*. Masing-masing indikator mengalami penurunan sebesar 29,39 % dan 3,29 %. Penyebab terjadinya penurunan capaian *Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS* tersebut ditengarai karena adanya peningkatan jumlah target pengunjung pada tahun 2019 dan telah adanya SILASTIK (sistem pelayanan statistik di BPS RI sehingga pengunjung lebih banyak langsung ke silastik),

target pengunjung sebesar 26.000 dengan realisasi 23.558 pengunjung, sedangkan target pada tahun 2018 hanya sebanyak 20.000 pengunjung. Perlu dilakukan evaluasi target pengunjung web yang lebih realistis dan adanya peningkatan usaha-usaha agar tingkat kunjungan terhadap website BPS Kabupaten Bandung lebih meningkat lagi. Namun demikian untuk capaian kinerja indikator sasaran yang lain, *Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional* pada tahun 2019 telah terjadi peningkatan yang cukup besar dibandingkan tahun 2018, dengan peningkatan capaian kinerja sebesar 46,29 %, sehingga capaian rata-rata indikator sasaran pun mengalami peningkatan sebesar 4,54 %.

Tabel 14. Capaian Kinerja Tujuan: Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik Tahun 2018-2019

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Capaian Kinerja 2018 (%)	Capaian Kinerja 2019 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik			
Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	Metadata	100	120
3.1 Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN			
Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	Metadata	100	120
Rata-Rata Capaian Indikator Sasaran		100	120

Capaian Kinerja Tujuan ketiga, yaitu **Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik** yang diukur dengan Indikator

Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 20 % dibandingkan dengan capaian tahun 2018. Demikian juga sama halnya pada capaian kinerja Sasaran strategis ***Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN*** yang diukur melalui indikator sasaran *Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun* mengalami peningkatan capaian menjadi 120%, sebagaimana yang terlihat pada tabel 14 di atas.

Pada tabel 15 di bawah ini dapat dilihat bahwa capaian Kinerja Tujuan keempat, yaitu **Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang akuntabel** yang diukur dengan indikator **Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat** mengalami peningkatan dengan hasil penilaian sebesar 61,34 poin, sehingga capaian sasaran strategis pertama pada tujuan keempat ini, *Meningkatnya birokrasi yang akuntabel* yang diukur melalui indikator sasaran *Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat* telah mencapai capaian kinerja sebesar 102,23 %.

Hasil Capaian kinerja Sasaran Strategis pada tujuan keempat yang kedua, yaitu ***Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS*** dengan indikator sasaran yang pertama, yaitu *Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS* diperoleh hasil adanya penurunan capaian kinerja dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 4,85 %, meskipun pada kedua tahun tersebut baik pada tahun 2018 maupun 2019 capaiannya masih tetap di atas target yang telah ditentukan (>100%). Sedangkan untuk indikator sasaran kedua *Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan* tidak mengalami penurunan capaian kinerja masih tetap tercapai 100 % sesuai target. Rata-rata Capaian Indikator Sasaran sedikit mengalami peningkatan dari 105,66 % menjadi 105,79 % pada tahun 2019.

Tabel 15. Capaian Kinerja Tujuan: Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang akuntabel Tahun 2018-2019

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Capaian Kinerja 2018 (%)	Capaian Kinerja 2019 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
4. Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang akuntabel			
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Point	58,19	61,34
4.1 Meningkatnya birokrasi yang akuntabel			
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Persen	96,98	102,23
Jumlah Satker BPS Kabupaten / Kota Yang Berpredikat WBK/WBBM	Satker	0	0
4.2 Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS			
Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	Persen	120,00	115,15
Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan	Persen	100,00	100,00
Rata-Rata Capaian Indikator Sasaran		105,66	105,79

3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja BPS Kabupaten Bandung Tahun 2019 terhadap Target Akhir Rencana Strategis (Renstra) 2015- 2019

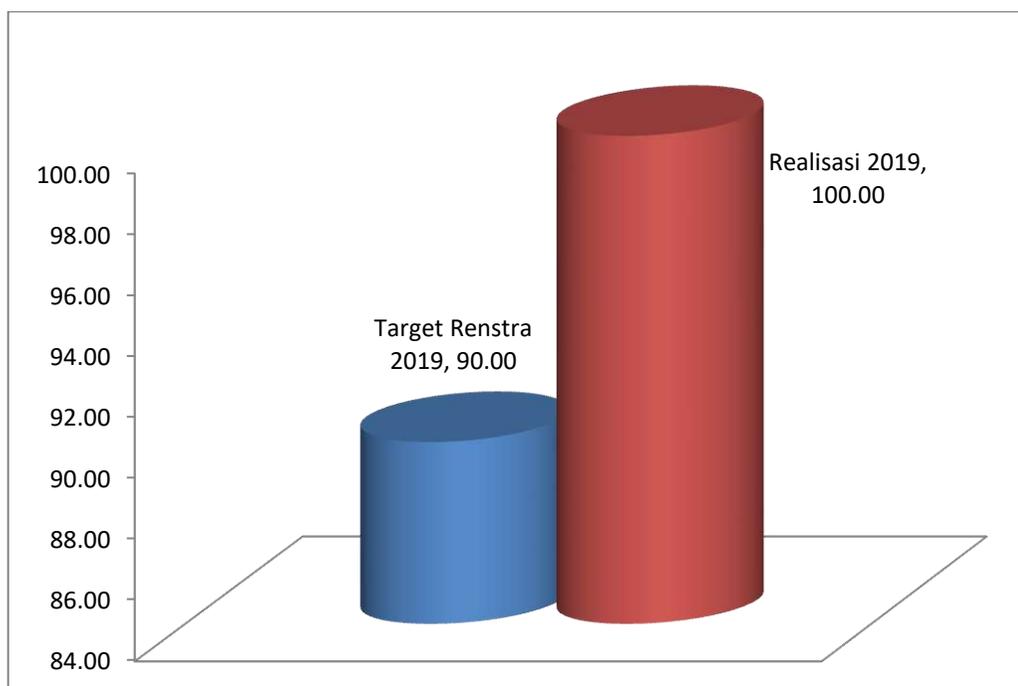
Pencapaian realisasi tahun 2019 terhadap target akhir Rencana Strategis 2015-2019 untuk tujuan pertama *Peningkatan kualitas data statistik* memperlihatkan hasil yang cukup memuaskan dengan realisasi tahun 2019 telah melebihi target 2019 sebesar 11,11%.

Demikian juga halnya untuk sasaran strategis ***Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS*** memiliki hasil yang relatif baik dengan rata-rata realisasi indikator sasaran sebesar 115,09 %. Dari 6 (enam) indikator sasaran, sebanyak 2 (lima) indikator sasaran telah mencapai realisasi 100%, yaitu untuk indikator sasaran *Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS dan Jumlah Publikasi/Laporan Sensus yang terbit tepat waktu*. 3 (tiga) indikator sasaran lainnya telah mencapai realisasi di atas 100 %, yaitu : *Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik* (111,11%), *Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama* (153,85%) dan *Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu* (129,63%). Hanya 1 (satu) indikator sasaran, yaitu *Persentase pemasukan dokumen (response rate) survey* yang memiliki realisasi masih di bawah 100 % , yaitu sebesar 95,58%. Nilai capaian tersebut masih terpaut 3,99% terhadap target Renstra tahun 2019. Namun demikian, nilai realisasi tahun 2019 ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan nilai capaian tahun 2018, yaitu sebesar 90,39 persen. Diharapkan capaian realisasi pada tahun-tahun mendatang akan dapat lebih meningkat lagi terutama pada indikator sasaran, *Persentase pemasukan dokumen (response rate) survey*.

Tabel 16. Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019 Tujuan Peningkatan Kualitas Data Statistik terhadap Target Indikator Kinerja Renstra Tahun 2019

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target Renstra 2019	Realisasi 2019	Realisasi 2019 thd Target Renstra 2019 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Peningkatan kualitas data statistik				
Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	90,00	100,00	111,1
1.1.Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS				
Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	90,00	100,00	111,11

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target Renstra 2019	Realisasi 2019	Realisasi 2019 thd Target Renstra 2019 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	Persen	65,00	100,00	153,85
Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	Persen	100	100,00	100,00
Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu	Laporan/publikasi	27	35	129,63
Jumlah Publikasi/Laporan Sensus yang terbit tepat waktu	Laporan/publikasi	1	1	100,00
Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei	Persen	99,16	95,17	95,98
Rata-rata Realisasi Indikator Sasaran				115,09



Gambar 12. Persentase Target Renstra 2019 dengan Realisasi 2019 Tujuan: Peningkatan Kualitas Data Statistik

Pada Tabel 17 menunjukkan bahwa Pencapaian realisasi tahun 2019 terhadap Target Renstra 2019 untuk tujuan yang kedua ***Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik*** dengan indikator tujuan *Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS* telah melebihi target Renstra 2019 sebesar 7,98 %. Sedangkan rata-rata nilai realisasi tahun 2019 dari 3 (tiga) indikator sasaran strategis ***Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (User Engagement)*** adalah sebesar 160,95 %, dengan nilai capaian seluruh indikator sasaran telah melebihi dari target Renstra 2019.

Tabel 17. Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019 Tujuan Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik terhadap Target Indikator Kinerja Renstra Tahun 2019

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target Renstra 2019	Realisasi 2019	Realisasi 2019 thd Target Renstra 2019 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik				
Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS	Persen	87,00	93,94	107,98
2.1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>User Engagement</i>)				
Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i> BPS	Pengunjung	21.000	23.558	112,18
Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS	Persen	85,00	85,35	100,41
Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	37,00	100,00	270,27
Rata-rata Realisasi Indikator Sasaran				160,95

Berdasarkan hasil pada tabel 18 menunjukkan bahwa pada tahun 2019 Realisasi indikator tujuan ketiga, yaitu ***Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik*** dan sasaran strategis ***Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN*** yang diukur dengan indikator tujuan dan sasaran ***Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun*** memperlihatkan hasil 20% di atas target Renstra 2019 dengan nilai realisasi sebesar 120,00 % . Hasil realisasi ini .

Tabel 18. Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019 Tujuan Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik terhadap Target Indikator Kinerja Renstra Tahun 2019

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target Renstra 2019	Realisasi 2019	Realisasi 2019 thd Target Renstra 2019 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik				
Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	Metadata	12	20	120,00
3.1 Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN				
Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	Metadata	12	20	120,00
Rata-rata Realisasi Indikator Sasaran				120,00

Capaian Realisasi Tujuan **Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang akuntabel** dengan indikator **Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat** pada tahun 2019 terhadap Target Renstra adalah sebesar 102,23 %. Nilai SAKIP tahun 2019 sebesar 61,34 point sudah berada di atas target Renstra 2019, yaitu sebesar 60 point. Hal yang

sama juga terjadi pada Sasaran strategis **Meningkatnya birokrasi yang akuntabel** yang memiliki indikator yang sama dengan indikator tujuan. Sedangkan Realisasi tahun 2019 terhadap Target Renstra 2019, untuk sasaran strategis **Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS** dengan 2 (dua) indikator sasaran *Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS* dan *Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan* telah dapat mencapai target Renstra, dengan realisasi masing-masing 115,15 % dan 100,00 %.

Tabel 19. Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019 Tujuan Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang akuntabel terhadap Target Indikator Kinerja Renstra Tahun 2019

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target Renstra 2019	Realisasi 2018	Realisasi 2018 thd Target Renstra 2019 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Peningkatan penyelenggaraan/pelaksanaan birokrasi yang akuntabel				
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Point	60	61,34	102,23
4.1 Meningkatkan birokrasi yang akuntabel				
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Point	60	61,34	102,23
Jumlah Satker BPS Kabupaten / Kota Yang Berpredikat WBK/WBBM	Satker	0	0	0
4.2 Meningkatkan Kualitas sarana dan Prasarana BPS				
Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	Persen	75	86,36	115,15
Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan	Persen	100	100,00	100,00
Rata-Rata Realisasi Indikator Sasaran				105,79

3.5. Kegiatan Prioritas BPS Kabupaten Bandung Tahun 2019

Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019, Pemerintah telah menetapkan 5 (lima) Prioritas Nasional yang diuraikan ke dalam 24 (dua puluh empat) Program Prioritas. Kebijakan pemerintah 5 (lima) Prioritas Nasional tersebut adalah :

- 1) ***Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar.***
- 2) ***Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman.***
- 3) ***Penguatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata, dan jasa produktif lainnya.***
- 4) ***Pemantapan ketahanan energi pangan, dan sumber daya air.***
- 5) ***Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan Pemilu.***

Banyak kegiatan-kegiatan survei yang dilakukan BPS Kabupaten Bandung selama tahun 2019 dan diantaranya terdapat beberapa Output kegiatan survei pada Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) yang masuk ke dalam 3 (tiga) Prioritas Nasional tahun 2019, yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan Survei Pendataan Potensi Desa , masuk ke dalam **Prioritas Nasional : *Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman.***
2. Kegiatan Pendataan PMTB Institusi dan Lapangan Usaha dan Survei Statistik Wisatawan Nusantara, masuk ke dalam **Prioritas Nasional : *Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya***
3. Kegiatan Survei Statistik Tanaman Pangan dan Survei Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi Dengan Kerangka Sampel Area, masuk ke dalam **Prioritas Nasional : *Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air***

Selain survei-survei yang masuk ke dalam Program Prioritas Nasional di atas, pada tahun 2019 juga terdapat beberapa survei yang menghasilkan Indikator-indikator Makro Sosial-Ekonomi yang penting dan hasilnya banyak ditunggu oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, sehingga menjadi kegiatan Prioritas BPS diantaranya adalah ***Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)*** dan ***Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS)***.

Disamping itu pada tahun 2019 terdapat pula kegiatan yang berkaitan dengan persiapan kegiatan Sensus Penduduk Tahun 2020 (SP2020) berupa kegiatan ***Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilayah Kerja Statistik SP2020***

3.5.1 Pendataan Potensi Desa (PODES) Tahun 2019

Pendataan Potensi Desa (PODES) merupakan merupakan pendataan terhadap ketersediaan infrastruktur dan potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah administrasi setingkat desa di seluruh Indonesia. Data hasil pendataan Potensi Desa (Podes) hingga saat ini merupakan satu-satunya sumber data tematik berbasis wilayah yang mampu menggambarkan potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah ditingkat desa, kecamatan, dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Data Podes dapat digunakan oleh berbagai pihak yang membutuhkan. Sebagai contoh, data Podes digunakan untuk identifikasi tipologi wilayah misalnya perkotaan-perdesaan, pesisir-nonpesisir, tertinggal-nontertinggal, dan sebagainya. Sejalan dengan perkembangan jaman, kebutuhan terhadap data dan informasi kewilayahan hingga wilayah terkecil dirasakan semakin beragam dan mendesak untuk dapat dipenuhi.

Podes telah dilaksanakan sejak tahun 1980. Pengumpulan data Podes dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 10 tahun, sebagai bagian dari siklus 10 tahunan kegiatan sensus yang dilakukan oleh BPS. Podes dilakukan 2 tahun sebelum pelaksanaan sensus untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus. Pada tahun berakhir '1', pendataan Podes dilaksanakan untuk mendukung Sensus Pertanian yaitu identifikasi wilayah konsentrasi usaha pertanian menurut sektor dan subsektor. Pada tahun berakhir '4', Podes dilaksanakan untuk mendukung Sensus Ekonomi dalam

rangka identifikasi usaha menurut sektor dan subsektor. Pada tahun berakhir '8', Podes dilaksanakan untuk mendukung Sensus Penduduk yaitu untuk identifikasi wilayah permukiman baru.

Mendesaknya kebutuhan data Podes yang *ter-update* setiap tahun, maka BPS perlu melakukan *Updating* data Podes. Data Podes yang di-update mencakup pelayanan dasar, kondisi infrastruktur dan aksesibilitas/transportasi. Kegiatan ini disebut dengan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (Updating Podes 2019), yang dilaksanakan setiap tahun di luar tahun pendataan podes.

Tujuan pemutakhiran data perkembangan desa adalah untuk menghasilkan data bagi keperluan pembangunan wilayah, memberikan data tentang potensi wilayah, ketersediaan infrastruktur/fasilitas, serta kondisi sosial-ekonomi di setiap desa/kelurahan.

Sedangkan tujuan khusus dari pemutakhiran data perkembangan desa adalah:

1. Menyediakan data dasar untuk menghitung Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yang nantinya akan dipergunakan sebagai salah satu variabel dalam pengalokasikan Dana Desa (DD)
2. Menyediakan data untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan perencanaan wilayah di tingkat nasional dan daerah
3. Menyediakan data tentang keberadaan dan perkembangan potensi yang dimiliki desa/kelurahan yang meliputi: pelayanan dasar, kondisi infrastruktur dan aksesibilitas/transportasi
4. Menyediakan data dukung untuk penyusunan Daerah Dalam Angka (DDA)
5. Menyediakan data untuk kepentingan perhitungan *urban/rural*

Sejak tahun 2008, pendataan Podes mengalami perubahan dengan adanya penambahan kuesioner suplemen kecamatan dan kabupaten/kota. Penambahan kuesioner tersebut bertujuan untuk meningkatkan manfaat data Podes bagi para konsumen data dan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan wilayah.



Gambar 13. Kegiatan Pelaksanaan Pendataan Potensi Desa (PODES) BPS Kabupaten Bandung Tahun 2019

Kegiatan pendataan Potensi Desa Tahun 2019 Kabupaten Bandung diselenggarakan di seluruh wilayah Kabupaten Bandung, pada 31 kecamatan dengan jumlah sampel 31 Kecamatan dan 280 Desa/Kelurahan. Pengumpulan data Podes 2019 dilakukan melalui wawancara langsung oleh petugas terlatih dengan narasumber yang relevan. Petugas adalah aparatur ataupun mitra kerja BPS Kabupaten/Kota, sementara narasumber adalah kepala desa/lurah atau narasumber lain yang memiliki pengetahuan terhadap wilayah target pencacahan.

3.5.2 Survei Penyusunan Disagregasi PMTB Menurut Institusi dan Lapangan Usaha

Sejalan dengan Program Prioritas Nasional Tahun 2019, yaitu ***Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya***, dibutuhkan data investasi fisik atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang telah di disagregasi menurut institusi dan lapangan usaha. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS)

Kabupaten Bandung telah melaksanakan kegiatan Survei Penyusunan Disagregasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Tahun 2019.

Survei Penyusunan Disagregasi PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) 2019 bertujuan untuk memperoleh sumber data Penyusunan Disagregasi PMTB menurut jenis barang modal - lapangan usaha dan jenis barang modal - sektor institusi, serta data neraca nasional lain yang terkait dengan investasi. Dengan tersedianya data PMTB yang rinci ini, akan membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan meningkatkan iklim investasi dan mempermudah investor dalam berusaha, serta membantu dunia usaha dalam menentukan arah kebijakan usahanya.

Survei Penyusunan Disagregasi PMTB tahun 2019 diharapkan akan menghasilkan data rinci penambahan dan pengurangan barang modal menurut jenis aset tetap, sektor institusi dan lapangan usaha sebagai dasar untuk perumusan berbagai kebijakan dan analisis investasi secara makro maupun mikro. Selain itu, hasil dari Survei Penyusunan Disagregasi PMTB Tahun 2019 ini juga digunakan sebagai sumber data dalam penyusunan stok capital.



Gambar 14. Pencacahan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB Tahun 2019

Cakupan wilayah kegiatan pendataan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019 dilaksanakan di 34 provinsi yang meliputi 514 kabupaten/kota di Indonesia. Pelaksanaan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB di lapangan dilaksanakan pada tanggal 01 April sampai dengan 30 Juni 2019. Untuk Kabupaten Bandung sampel

berjumlah 128 responden dan tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bandung, dengan rincian responden sebagai berikut :

No	Kategori	Jumlah Sampel	
1	Finansial	8	Responden
2	Non Finansial	69	Responden
3	Rumah Tangga	25	Responden
4	Desa	6	Responden
5	Lnprt	12	Responden
6	Dinas	8	Responden
	Jumlah	128	Responden

3.5.3 Survei Wisatawan Nusantara (WISNUS) Tahun 2019

Aktivitas pariwisata di Indonesia sudah mulai tumbuh dan berkembang, bahkan mulai menjadi trend dan gaya hidup tersendiri dalam masyarakat. Sehingga kegiatan pariwisata diharapkan dapat menjadi sektor andalan yang mampu menggerakkan sektor-sektor ekonomi lain yang terkait erat. Pemerintah selain gencar menarik minat wisatawan mancanegara untuk meningkatkan devisa, juga sedang berusaha untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara (wisnus). Meskipun wisnus tidak mendatangkan devisa bagi negara, namun tidak bisa dipandang sebelah mata, terutama kemampuannya dalam menggerakkan perekonomian negara melalui peningkatan konsumsi rumah tangga. Perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan nusantara mampu menghidupkan sektor angkutan, perhotelan, industri kreatif, dan lain sebagainya.

Kegiatan pendataan wisnus dimulai sejak tahun 1981. Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu modul dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) setiap 3 tahun sekali yang dilaksanakan pada tahun 1984, 1991, 1994, 1997, 2002, 2003, dan 2008. Angka tahunan yang digunakan merupakan proyeksi dari data hasil kegiatan tersebut. Mulai tahun 2011, seiring dengan perubahan periodisasi Susenas, pendataan wisnus dilakukan setiap tiga bulan (triwulanan). Kegiatan ini dicakup dalam Susenas KOR sehingga data tahunannya diperoleh dari gabungan empat triwulan. Data ini kemudian

digunakan sebagai kerangka sampel dalam kegiatan Survei Profil Wisatawan Nusantara. Namun sejak triwulan empat tahun 2014, kegiatan pendataan tersebut berhenti seiring dengan perubahan periode pendataan Susenas. Pada tahun 2015 hingga saat ini, Susenas KOR hanya dilakukan sekali setahun yaitu pada bulan Maret. Keadaan ini akan sangat berpengaruh jika data perjalanan (wisnus) diambil dari susenas KOR, terutama data mengenai jumlah perjalanan selama satu tahun. Pendataan profil wisnus pada tahun 2015 tidak menggunakan kerangka sampel dari data Susenas KOR karena pengolahan datanya belum selesai pada saat kegiatan dilakukan.



Gambar 15. Kegiatan Pencacahan Survei Wisatawan Nusantara 2019 di Kabupaten Bandung

Mengingat pentingnya ketersediaan data dan informasi perihal kegiatan perjalanan beserta semua aspek yang terkait secara rinci, cermat, dan tepat waktu, maka diperlukan pengumpulan data-data tersebut secara terencana, berkesinambungan dan kontinyu. Salah satu upaya yang dilakukan dalam mengumpulkan informasi tersebut adalah melalui kegiatan Survei Wisatawan Nusantara pada tahun 2018 untuk melanjutkan kegiatan yang serupa di tahun 2017.

Adapun tujuan dari Survei Wisatawan Nusantara ini adalah untuk mengumpulkan data atau informasi terutama mengenai berbagai karakteristik demografi maupun karakteristik perjalanan serta pengeluaran/konsumsi yang dilakukan

oleh penduduk Indonesia dalam rangka melakukan perjalanan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Survei Wisatawan Nusantara 2019 dilaksanakan pada 34 provinsi yang tersebar ke dalam 514 kabupaten/kota. Pendaftaran rumah tangga dilakukan dengan cara pemutakhiran. Survei ini dilakukan secara triwulanan.

Survei Wisatawan Nusantara tahun 2019 di Kabupaten Bandung dilaksanakan selama empat triwulan. Pelaksanaan Survei Wisatawan Nusantara setiap triwulan dilakukan dengan dua tahapan kegiatan yaitu Pendaftaran Bangunan dan Rumah Tangga serta Pencacahan Sampel Rumah Tangga. Khusus di triwulan IV 2019, Survei Wisatawan Nusantara dilakukan hanya satu rangkaian kegiatan yaitu Pendaftaran Banguna dan Rumah Tangga.

Kegiatan Pendaftaran Bangunan dan Rumah Tangga setiap triwulannya mencakup 27 Blok Sensus yang tercantum dalam Daftar Sampel Blok Sensus (DSBS) yang sudah ditentukan oleh BPS RI.

3.5.4 Survei Statistik Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan

Sektor pertanian masih menjadi salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia, dimana tahun 2017 memiliki kontribusi 13,14 persen atas GDP. Namun begitu, berbagai isu penting patut terus diwaspadai, antara lain: (1) jumlah rumah tangga pertanian yang terus menurun dari 31,23 juta pada ST2003 menjadi 26,14 juta pada ST2013; (2) pertumbuhan sektor pertanian yang cukup lambat yaitu tercatat 3,81 persen pada tahun 2017; (3) gejolak harga pangan yang saat ini makin menjadi tantangan Pemerintah, hingga program reformasi agraria yang dicanangkan untuk mengembalikan kedaulatan pangan Indonesia.

Berbicara sektor pertanian dan kedaulatan pangan pasti tidak terlepas dari subsektor tanaman pangan karena memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kehidupan sebagian besar penduduk Indonesia. Untuk itu program **kedaulatan pangan** masih menjadi prioritas utama agenda pembangunan pemerintah sampai saat ini.

Salah satu isu penting dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan ini adalah data produksi pangan. Ketersediaan data statistik pangan yang berkualitas, obyektif dan akurat sangat diperlukan untuk dasar rujukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi agar segala kebijakan yang diambil pemerintah tidak salah sasaran sehingga pengambilan keputusan yang dilakukan menjadi lebih efektif dan efisien.



Gambar 16. Kegiatan Pelaksanaan Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan BPS Kabupaten Bandung Tahun 2019

Adapun tujuan Survei Statistik Tanaman Pangan/Ubinan secara khusus adalah sebagai berikut :

1. Memperoleh Informasi mengenai Produktivitas (hasil per hektar) komoditas tanaman pangan (padi dan palawija)
2. Memperoleh Informasi pendukung lainnya, seperti koordinat lokasi ubinan, cara penanaman, sistem penanaman jajar legowo, penggunaan pupuk, penanggulangan organisme pengganggu tanaman (OPT) dan lain-lain

Cakupan wilayah Survei Statistik Tanaman Pangan tersebar di 31 Kecamatan di Kabupaten Bandung. Ditambah dengan pengumpulan data rutin melalui kegiatan Statistik Pertanian (SP) Tanaman Pangan yaitu SP Padi dan SP Palawija bulanan dari Dinas Pertanian dari 31 Kecamatan di Kabupaten Bandung.

Jenis-jenis Dokumen dan Frekwensi pengumpulan data Survei Statistik Tanaman Pangan adalah sebagai berikut

No	Jenis Daftar	Frekuensi Pengumpulan	Jadwal Pelaporan
1	SP-Padi	Bulanan	Tanggal 5 setelah bulan ybs berakhir
2	SP-Palawija	Bulanan	Tanggal 5 setelah bulan ybs berakhir
3	SP-Lahan	Tahunan	Tanggal 5 Januari
4	SP-Alsintan TP	Tahunan	Tanggal 5 Januari
5	SP-Benih TP	Tahunan	Tanggal 5 Januari
6	Daftar Sub-P SR I	Januari-April	2 minggu sebelum subround berjalan
7	Daftar Sub-P SR II	Mei-Agustus	2 minggu sebelum subround berjalan
8	Daftar Sub-P SR III	September-Desember	2 minggu sebelum subround berjalan
9	Daftar Sub-DS SR I	Januari-April	1 minggu sebelum subround berjalan
10	Daftar Sub-DS SR II	Mei-Agustus	1 minggu sebelum subround berjalan
11	Daftar Sub-DS SR III	September-Desember	1 minggu sebelum subround berjalan
12	Daftar Sub-S SR I	Januari-April	Untuk bulan yang ada panen, dikirimkan bersama dengan waktu pengiriman Daftar SP-Padi dan SP-Palawija
13	Daftar Sub-S SR II	Mei-Agustus	
14	Daftar Sub-S SR III	September-Desember	

Jumlah sampel Survei Statistik Tanaman Pangan tahun 2019 di Kabupaten Bandung untuk masing-masing jenis data survei yang dikumpulkan adalah sebagai berikut :

Kegiatan	Jumlah sampel	Keterangan
Listing/ Pendaftaran Rumahtangga Survei Produksi Tanaman Pangan Subround I	62 Blok Sensus	Desember
Listing/ Pendaftaran Rumahtangga Survei Produksi Tanaman Pangan Subround II	50 Blok Sensus	April
Listing/ Pendaftaran Rumahtangga Survei Produksi Tanaman Pangan Subround III	33 Blok Sensus	Agustus
Pencacahan Sampel Survei Produksi Tanaman Pangan Subround I	179 plot	Januari-April
Pencacahan Sampel Survei Produksi Tanaman Pangan Subround II	186 plot	Mei-Agustus
Pencacahan Sampel Survei Produksi Tanaman Pangan Subround II	195 plot	September-Desember
SP-PADI	31 Kecamatan	
SP-PALAWIJA	31 Kecamatan	
SP-BENIH	31 Kecamatan	
SP-ALSINTAN	31 Kecamatan	
SP-LAHAN	31 Kecamatan	

3.5.5 Pendataan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA)

Selama ini pengumpulan data luas panen baik padi maupun palawija masih menggunakan metode konvensional dengan menggunakan daftar isian Statistik Pertanian (SP). Berdasarkan metode tersebut, pengumpulan data luas panen masih didasarkan pada hasil pandangan mata (*eye estimate*) petugas pengumpul data. Meskipun secara praktek metode tersebut mudah untuk diterapkan tetapi penggunaan metode tersebut masih memiliki kekurangan. Rendahnya akurasi dan waktu pengumpulan data yang cukup lama menjadi beberapa kekurangan dari penggunaan metode tersebut.

Di sisi lain, saat ini pemerintah Indonesia sedang sangat gencar melancarkan program-program yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas produksi komoditas pertanian dalam upaya mendukung salah satu cita-cita Nawacita yakni terwujudnya swasembada pangan di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, maka tersedianya data pertanian yang tepat waktu dan akurat merupakan pondasi untuk dapat mewujudkan kebijakan pertanian yang tepat sasaran maka perbaikan metodologi dalam pengumpulan data pertanian harus dilakukan.

Dukungan untuk perbaikan data pertanian khususnya terkait metodologi pengumpulan data telah datang dari berbagai pihak, salah satu diantaranya adalah dari Forum Masyarakat Statistik (FMS) Indonesia. Melalui surat yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang diusulkan dalam rangka perbaikan data pertanian di Indonesia. Salah satu poin penting pada rekomendasi kebijakan yang diusulkan adalah usulan untuk mempertimbangkan penggunaan aplikasi secara luas metode estimasi produksi padi melalui kerangka sampel area (KSA) yang mengintegrasikan data spasial dan data lapangan menggunakan teknologi komunikasi digital yang lebih obyektif.

Selain itu dukungan perbaikan metodologi pengumpulan data pertanian juga datang dari Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia. Dalam surat Kepala KSP

bertanggal 16 Juni 2016 yang ditujukan pada Kepala BPS, KSP mengajukan usulan untuk pembangunan kerangka sampel di seluruh provinsi di Indonesia yang tahapan awalnya dimulai dengan pembangunan kerangka sampel di Jawa dan dilanjutkan dengan pembangunan kerangka sampel untuk seluruh provinsi di luar Jawa. Hal tersebut dilakukan sehubungan dengan penugasan kepada BPS untuk dapat menghasilkan data statistik produksi padi yang akurat dan sangat dibutuhkan untuk pengambilan keputusan pemerintah secara tepat terkait upaya untuk menjaga ketahanan pangan rakyat, khususnya mengenai kebijakan cadangan beras pemerintah, impor beras dan stabilisasi harga beras. Dalam penerapan metode sampling dan pelaksanaan survey secara sah, Badan Pusat Statistik (BPS) diharapkan melibatkan kalangan akademis, Forum Masyarakat Statistik atau ilmuwan di bidang terkait dalam proses pembangunan kerangka sampel.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, BPS melakukan kerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk menyusun kerangka sampel dan system pelaporan yang digunakan dalam pengumpulan data statistik pertanian yang berbasis teknologi dalam rangka memperbaiki metodologi pengumpulan data statistik pertanian. Kerjasama tersebut kemudian diwujudkan dalam suatu kegiatan yang bertajuk "Pengumpulan Data Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA)". Untuk tahun 2019 pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam kegiatan ini dilakukan pengamatan fase tumbuh padi pada titik-titik pengamatan dalam sampel segmen.



Gambar 17. Kegiatan Pelaksanaan Pendataan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode KSA BPS Kabupaten Bandung Tahun 2019

Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi di Pulau Jawa dengan metode Kerangka Sampel Area adalah untuk memperbaiki metode pengumpulan data yang dahulu konvensional menjadi lebih obyektif dan modern dengan melibatkan peranan teknologi di dalamnya, sehingga data pertanian yang dikumpulkan menjadi lebih akurat dan tepat waktu. Pelaksanaan pengumpulan data statistik pertanian dengan menggunakan system KSA di Pulau Jawa ini juga merupakan tindak lanjut dan perbaikan dari kegiatan uji coba sebelumnya yakni Uji Coba Kerangka Sampel Area (KSA) di Kabupaten Indramayu dan Garut pada tahun 2015 dan juga pelaksanaan tahun 2017.

Instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan pendataan statistik pertanian tanaman pangan terintegrasi di Pulau Jawa dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA) adalah sebagai berikut :

1. Peta Lingkungan Sekitar
2. Foto Lingkungan Sekitar
3. Foto segmen dan titik pengamatan.
4. Alat komunikasi HP berbasis android/perangkat android (milik pribadi)
5. Sistem Aplikasi Survei KSA

6. Pedoman Pelaksanaan Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi di Pulau Jawa dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA).
7. Pedoman Teknis Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi di Pulau Jawa dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA)

3.5.6 Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2019

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) merupakan salah satu survei rutin Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber utama untuk kegiatan pembangunan di bidang sosial dan ekonomi. Data dan informasi yang dihasilkan dari Susenas selalu ditunggu dan menjadi rujukan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta. Indikator yang dihasilkan dari Susenas juga menjadi rujukan utama untuk memantau perkembangan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) setiap tahunnya hingga tahun 2030. Dengan demikian, menjaga kualitas data Susenas merupakan hal yang harus benar-benar diperhatikan dan menjadi tanggung jawab bersama antara pusat dan daerah. Susenas menjadi sandaran utama untuk memenuhi kebutuhan nasional agar sejalan dengan tujuan pembangunan.

Susenas telah dilaksanakan lebih dari lima dasa warsa, dimana Susenas pertama kali dilaksanakan pada Tahun 1963, dengan fokus pada pengumpulan data konsumsi/pengeluaran rumah tangga. Dari waktu ke waktu cakupan materi Susenas semakin banyak dan beragam, sehingga memerlukan pengaturan siklus (periode) waktu pengumpulan datanya. Dengan perannya yang semakin penting sebagai sumber data bidang sosial ekonomi dan kesejahteraan rakyat, maka pada Tahun 1992 BPS melakukan pengembangan materi Susenas sekaligus penataan waktu pendataannya. Karena memang cakupan materinya luas, maka Susenas merupakan “*Mother of Survey*”, hal ini digambarkan dengan 3 dari 4 target pembangunan nasional berasal dari data Susenas. Target pembangunan nasional yang dapat digambarkan dari data Susenas antara lain data terkait angka kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Ketimpangan pendapatan (*gini ratio*).

Susenas merupakan salah satu sumber data sosial ekonomi rumah tangga yang penting di Indonesia. Dalam pelaksanaan Susenas 2019, hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang petugas Susenas adalah melakukan pengisian kuesioner pemutakhiran rumah tangga, daftar sampel rumah tangga, kuesioner pencacahan modul hansos, serta kuesioner pencacahan rumah tangga sampel konsumsi/pengeluaran



Gambar 18. Kegiatan Pelaksanaan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS Kabupaten Bandung Tahun 2019

Selain sebagai salah satu sumber data penting untuk perencanaan dan evaluasi Program Pembangunan Nasional (Propenas) dan Program Sektorial (Kementerian/Lembaga), Susenas juga menjadi sumber data utama untuk penyediaan indikator *Millenium Development Goals* (MDGs) dan *Sustain Sustainable Development*

Goals (SDGs), RPJMN dan Nawacita. Data hasil Susenas telah banyak digunakan oleh berbagai kalangan, baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu, kesinambungan ketersediaan dan kualitas data Susenas harus tetap dijaga dan ditingkatkan. Kualitas data hasil survei dipengaruhi oleh dua hal, yaitu *sampling error* dan *non sampling error*. Data berkualitas harus memiliki *sampling error* dan *non sampling error* yang serendah-rendahnya.

Secara umum tujuan pengumpulan data melalui Survei sosial ekonomi nasional (SUSENAS) tahun 2019 adalah menyediakan data pokok mengenai keterangan sosial ekonomi penduduk yang berkesinambungan serta data konsumsi dan pengeluaran untuk menghitung angka kemiskinan.

Kegiatan Survei sosial ekonomi nasional (SUSENAS) tahun 2019 di BPS Kabupaten Bandung, dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan kegiatan, yaitu Kegiatan Susenas Maret 2019 dan Susenas September 2019.

Pada kegiatan Susenas Maret 2019, Pemutakhiran rumah tangga dilakukan mulai tanggal 18 sampai dengan 23 Februari 2019. Target pemutakhiran rumah tangga adalah 10.407 rumah tangga, sedangkan realisasi pemutakhiran rumah tangga adalah 11.064 rumah tangga. Sedangkan untuk Pencacahan rumah tangga dilakukan mulai tanggal 1 sampai dengan 20 Maret 2019. Target pencacahan rumah tangga adalah 1.080 rumah tangga, sedangkan realisasi pencacahan rumah tangga adalah 1.079 rumah tangga dan 1 rumah tangga non respon.

Pada kegiatan Susenas September 2019, Pemutakhiran rumah tangga dilakukan mulai tanggal 21 sampai dengan 30 Agustus 2019. Target pemutakhiran rumah tangga adalah 2.858 rumah tangga, sedangkan realisasi pemutakhiran rumah tangga adalah 2.878 rumah tangga. Sedangkan Pencacahan rumah tangga dilakukan mulai tanggal 2 sampai dengan 21 September 2019. Target pencacahan rumah tangga adalah 270 rumah tangga, dengan realisasi pencacahan rumah tangga adalah 270 rumah tangga dan 0 rumah tangga non respon.

3.5.7 Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2019

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dilaksanakan rutin setiap tahun dan menghasilkan data yang berkaitan dengan kondisi dan profil ketenagakerjaan yang ada di masyarakat meliputi Penduduk Usia Kerja (PUK), Pengangguran, dan informasi pekerja. Data dan indikator dari Sakernas telah dipergunakan secara luas dan dipandang sebagai salah satu bukti penting yang dapat berguna untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi program pembangunan pemerintah.

Pendekatan teori ketenagakerjaan yang digunakan dalam Sakernas sejak tahun 1984 menggunakan Konsep Baku Angkatan Kerja (*Standard Labour Force Concept*) yang tertuang dalam *International Conference of Labour Statisticians* (ICLS) ke-13 tahun 1982. Pada tahun 2013, *International Labour Organization* (ILO) menyelenggarakan ICLS ke-19 yang menghasilkan beberapa pengembangan konsep definisi variabel-variabel ketenagakerjaan, serta menyesuaikan konsep aktivitas produktif (yang dalam ICLS ke-19 disebut dengan *Work*) dengan batasan produksi yang mengacu pada *System Nation Account* (SNA) 2008.





Gambar 19. Kegiatan Pelaksanaan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS Kabupaten Bandung Tahun 2019

Mulai tahun 2016, kuesioner Sakernas sudah mengadopsi 2 konsep baku ketenagakerjaan dari ICLS ke-13 dan ICLS ke-19 meskipun konsep ICLS ke-19 belum diakomodir secara utuh. Pada Sakernas 2018 dilakukan penyempurnaan kembali konsep ICLS ke-19 mencakup penyempurnaan alur pertanyaan dan penambahan beberapa pertanyaan dalam kuesioner.

Secara umum, tujuan pengumpulan data melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2019 adalah menyediakan data pokok ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Secara khusus, untuk memperoleh estimasi data jumlah penduduk bekerja, jumlah engangguran, dan indikator ketenagakerjaan lainnya serta perkembangannya di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.

Kegiatan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2019 di BPS Kabupaten Bandung dilaksanakan melalui 3 tahapan kegiatan, yaitu : Sakernas Semester I (Bulan Februari), Sakernas Semester II (Bulan Agustus), dan Sakernas Tahunan.

Pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran/*Updating Listing* rumahtangga Blok Sensus Sakernas Semester I (Februari) Tahun 2019 dilakukan mulai tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019, sedangkan Pencacahan rumah tangga dilakukan mulai tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan 28 Februari 2019. Target pencacahan rumah tangga adalah sebanyak 270 rumah tangga, dengan realisasi pencacahan seluruh rumah tangga sebanyak 270 rumah tangga berhasil di cacah.

Pelaksanaan pemutakhiran/*Updating Listing* rumahtangga Blok Sensus Sakernas Semester II (Agustus) Tahun 2019 dilakukan mulai tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019, sedangkan kegiatan Pencacahan rumah tangga dilakukan mulai tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019. Target pencacahan rumah tangga adalah sebanyak 288 rumah tangga, dengan hasil realisasi pencacahan rumah tangga adalah sebanyak 285 rumah tangga yang berhasil di cacah, dan 3 Rumah tangga tidak dapat ditemui karena pindah keluar blok sensus.

Pemutakhiran/*Updating Listing* rumahtangga Blok Sensus Sakernas Tahunan Tahun 2019 dilakukan mulai tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan 7 Agustus 2019, sedangkan Pencacahan rumah tangga dilakukan mulai tanggal 8 sampai dengan 31 Agustus 2019. Target pencacahan rumah tangga adalah 810 rumah tangga, sedangkan realisasi pencacahan rumah tangga adalah 808 rumah tangga yang berhasil di cacah, 2 Rumah tangga tidak dapat ditemui karena pindah keluar blok sensus.

3.5.8 Kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilayah Kerja Statistik SP2020

Sensus Penduduk akan diselenggarakan kembali oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020. Sensus Penduduk (SP) 2020 adalah Sensus Penduduk ke-7 yang diselenggarakan oleh BPS sejak Indonesia merdeka. Pelaksanaan SP2020 oleh BPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan lapangan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) tidak terjadi lewat cacah atau cacah ganda, diperlukan kerangka sampel yang tepat dan berkualitas. Mengingat bahwa pelaksanaan SP2020 akan menggunakan *combine method* dengan memanfaatkan data dasar dari data Administrasi Kependudukan (adminduk) Dinas Catatan Sipil, maka diperlukan kerangka sampel dalam bentuk yang sesuai dengan cakupan data adminduk tersebut.

Secara umum data adminduk akan memiliki cakupan Rukun Tetangga (RT), sementara kerangka sampel yang dimiliki oleh BPS adalah Blok Sensus. Oleh karena itu, untuk menyesuaikan kerangka sampel BPS dengan data adminduk maka BPS akan melakukan pembentukan kerangka sampel baru.

Mengingat tidak semua wilayah di Indonesia memiliki tingkatan administrasi sampai tingkat RT, maka untuk menyeragamkannya BPS menggunakan istilah satuan lingkungan setempat (SLS) untuk mengakomodir perbedaan cakupan tingkatan administrasi terkecil yang ada di Pemerintahan Daerah. SLS menyatakan wilayah yang memiliki sistem administrasi, sedangkan untuk wilayah yang tidak memiliki sistem administrasi (seperti hutan, padang rumput, dll) akan digunakan istilah Non SLS.

Kerangka sampel akan dibentuk sampai tingkat SLS/Non SLS dengan muatan yang terdapat didalamnya terdiri dari jumlah keluarga, jumlah bangunan sensus tempat tinggal, bangunan sensus bukan tempat tinggal dan bangunan ekonomi.

Kegiatan pembentukan kerangka sampel wilayah ini dinamakan Pemetaan dan Pemutakhiran Wilayah Kerja Statistik (wilkerstat) Sensus Penduduk 2020 (SP2020). Dengan maksud untuk mengembangkan *statistical spatial framework* sebagai jembatan integrasi informasi statistik dan geospasial, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan kerangka induk wilayah kerja statistik sebagai dasar pelaksanaan lapangan SP2020. Tujuan dari kegiatan ini adalah menyediakan kerangka sampel SP2020 yang mutakhir dalam bentuk peta dan daftar wilayah SLS/Non SLS beserta informasi muatan dalam SLS/Non SLS (KK dan Bangunan).

Cakupan dari kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Wilayah Kerja Statistik (wilkerstat) Sensus Penduduk 2020 (SP2020) adalah seluruh wilayah di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan mencakup 31 Kecamatan dan 280 Desa/kelurahan yang terdapat di Kabupaten Bandung.





Gambar 20. Kegiatan Pelatihan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilayah Kerja Statistik SP2020

Sasaran Pemetaan dan Pemutakhiran Wilayah Kerja Statistik (wilkerstat) Sensus Penduduk 2020 (SP2020) adalah mengumpulkan informasi-informasi yang terdiri dari:

1. Daftar SLS dan Non SLS
2. Muatan SLS/Non SLS : Jumlah KK, Jumlah Bangunan Sensus Tempat Tinggal (BSTT), Jumlah Bangunan Sensus Bukan Tempat Tinggal (BSBTT), Bangunan Sensus Tempat Tinggal Kosong (BSTTK, dan Jumlah Bangunan Sensus Kegiatan Ekonomi (BSKEKO).
3. Batas SLS/Non SLS, dan
4. Infrastruktur terkait PODES yang terdapat dalam SLS/Non SLS.

Pelaksanaan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilayah Kerja Statistik (Wilkerstat) Sensus Penduduk 2020 (SP2020) terbagi dalam 2 (dua) lokus kegiatan yaitu dilaksanakan di BPS Provinsi Jawa Barat dan dilaksanakan di BPS Kabupaten Bandung sesuai dengan penunjukan tugas di masing-masing wilayah, dengan rincian sebagai berikut :

KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
BPS Kabupaten Bandung :	
<u>Tahap 1 (Lapangan)</u>	
1. Pelatihan petugas	27 Maret – 10 April 2019
2. Pelaksanaan lapangan	22 April – 22 Mei 2019
<u>Tahap 2 (Pengolahan)</u>	
1. Pengolahan SP2020-RD dan SP2020-RS	6 Mei – 17 Juni 2019
2. Pengolahan peta digital hasil lapangan	23 Mei – 25 Juli 2019

KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
3. Layouting peta	13 Sept – 30 Okt 2019
BPS Provinsi Jawa Barat :	
<u>Tahap 1 (Lapangan)</u>	
1. Pelatihan Inda	4 – 16 Maret 2019
<u>Tahap 2 (Pengolahan)</u>	
1. Pelatihan petugas pengolahan peta dan RD	22 April – 3 Mei 2019
2. Kompilasi dan revalidasi RD	17 Juni – 14 Juli 2019
3. Pengiriman RD	1 – 14 Juli 2019
4. Kompilasi dan sinkronisasi peta digital	22 Juli – 8 Agustus 2019

Output yang dihasilkan dari kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilayah Kerja Statistik Sensus Penduduk 2020 adalah :

- Peta desa dan SLS (satuan lingkungan setempat) dalam bentuk analog dan digital yang dilengkapi titik *geotagging* infrastruktur.
- Daftar nama SLS yang terdapat di wilayah Kabupaten Bandung
 - Manfaat dari peta wilkerstat yang dihasilkan adalah :
 - sebagai panduan mencari lokasi dilapangan agar tidak terjadi lewat cacah atau *double* cacah,
 - sebagai informasi awal untuk melihat beban kerja petugas, dan
 - Sebagai *frame* kegiatan sensus dan survei.

Pelaksanaan Lapangan yang dilakukan pada kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilayah Kerja Statistik (wilkerstat) Sensus Penduduk 2020 (SP2020), terdiri dari :

1. Identifikasi wilayah dengan menggunakan Lembar Daftar Identifikasi Wilayah Kerja oleh pemeta.
2. Pengisian dokumen SP2020-RS oleh pengawas berdasarkan informasi dari Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan lainnya.
3. Rekonsiliasi antara data SLS/Non SLS yang terdapat di Lembar Daftar Identifikasi Wilayah (IDW) dan dokumen SP2020-RS.
4. Penelusuran wilayah oleh pemeta untuk mengetahui wilayah tugasnya.

5. Pelaksanaan *geotagging* titik batas SLS/Non SLS oleh pemeta untuk menandakan batas SLS/Non SLS dengan menggunakan aplikasi android bernama “wilkerstat” yang diciptakan oleh Sub Direktorat Pengembangan Pemetaan Statistik BPS.
6. Pelaksanaan *geotagging* infrastruktur yang terdapat pada SLS/Non SLS oleh pemeta dengan menggunakan aplikasi android wilkerstat. Infrastruktur yang di *tagging* terdiri dari :
 - Lembaga Pendidikan : TK, RA/BA, SD, MI, SMP, MTs, SMU, MA, SMK, PT.
 - Lembaga Kesehatan, RS, RS Bersalin, Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Posyandu, Polindes, Apotek, Warung jamu/toko herbal/toko obat.
 - Lembaga Ekonomi : Kelompok Pertokoan, Pasar, Minimarket.
 - Lembaga Akomodasi : Restoran/rumah makan, Warung/kedai makanan minuman, Hotel, Penginapan.
 - Lembaga Keuangan : Bank, BPS.
 - Lembaga Pemerintahan dan Perkantoran : Kantor Desa, Kantor Camat, Kantor Bupati/Walikota, Kantor Gubernur.
 - Tempat Ibadah : Masjid, Gereja, Pura, Wihara.
7. Pelaksanaan penghitungan muatan yang terdapat dalam SLS/Non SLS oleh pemeta. Muatan yang dihitung terdiri dari Jumlah KK, Jumlah Bangunan Sensus Tempat Tinggal (BSTT), Jumlah Bangunan Sensus Bukan Tempat Tinggal (BSBTT), Bangunan Sensus Tempat Tinggal Kosong (BSTTK, dan Jumlah Bangunan Sensus Kegiatan Ekonomi (BSKEKO). Penghitungan muatan dituliskan dalam lembar LKM.
8. Penggambaran batas SLS/Non SLS dan batas segmen pada peta SP2020WB oleh pemeta.
9. Pengisian dokumen SP2020-RD oleh pengawas berdasarkan isian lembar LKM.
10. Pengisian Lembar Laporan Pengawasan oleh pengawas.
11. Penggabungan gambar batas SLS/Non SLS dari peta SP2020WB ke peta SP2020WA oleh pengawas.

Pelaksanaan lapangan kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilayah Kerja Statistik SP2020 telah dilaksanakan dari tanggal 22 April 2019 sampai dengan 22 Mei 2019 dengan Output dari kegiatan ini terdiri dari:

- Daftar SP2020RS dan daftar SP2020RD yang sudah terisi,
- Titik koordinat batas SLS/Non SLS,
- Titik koordinat infrastruktur,
- Batas wilayah SLS terkecil yang tergambar secara manual di peta SP2020WB Sementara, dan
- Perbaiki batas wilayah desa yang tergambar secara manual di peta SP2020WA Sementara.

3.6. Upaya Efisiensi BPS Kabupaten Bandung 2019

Upaya efisiensi yang dilakukan BPS Kabupaten Bandung selama tahun 2019 diantaranya adalah penghematan sumber daya dan penganggaran.

BPS Kabupaten Bandung telah berupaya untuk melakukan penghematan sumberdaya energi listrik, dengan memberikan pengarahan dan sosialisasi kepada seluruh pegawai agar senantiasa melakukan pengecekan sebelum pulang kerja di masing-masing ruangan kerja, dengan cara mematikan AC (*Air Conditioner*), Monitor PC (*Personal Computer*), CPU (*Computer Processing Unit*), UPS (*Uninterrupted Power Supply*) komputer, Televisi dan lampu ruangan.

Upaya penghematan penggunaan Sumberdaya air dilakukan dengan cara : pemeriksaan kebocoran tanki, pipa instalasi air dan kran-kran air secara berkala, penjadwalan pengisian tanki air, pemasangan pelampung pada tanki penampungan air dan himbauan bagi para pegawai menutup kran air pada saat yang bersangkutan akan keluar dari kamar mandi/toilet.

Penghematan biaya penggunaan telpon kantor, dilaksanakan dengan pemberitahuan dan himbauan kepada seluruh pegawai agar penggunaan telpon kantor hanya digunakan khusus untuk kepentingan dinas saja bukan keperluan pribadi. Hal ini

tampaknya relatif berhasil dengan melihat adanya penurunan total pembayaran biaya langganan telpon dari tahun ke tahun selama 4 tahun terakhir.

**Tabel 20. Perbandingan Nilai Biaya Langganan Telpon per Tahun
BPS Kabupaten Bandung Tahun 2016-2019**

Uraian	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Biaya Langganan Telpon per Tahun (Rp.)	3.786.956,-	2.528.426,-	1.676.878,-	1.414.511,-

Upaya penghematan lainnya adalah penggunaan kembali kertas bekas pakai pada balik halaman yang masih kosong untuk melakukan pencetakan *draft* laporan, absensi manual, memo presensi, penempelan bon bukti belanja pada lampiran SPJ dan sebagainya.

Dari sisi penganggaran, dari Tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 telah terjadi beberapa kali Revisi DIPA dalam rangka efisiensi/penghematan anggaran dan peningkatan efektivitas anggaran di BPS Kabupaten Bandung, yang dapat dilihat dari revisi perubahan PAGU Anggaran awal sampai dengan akhir.

Pada revisi DIPA ke-3 pada bulan Mei 2019 terjadi efisiensi/penghematan anggaran atau Pengurangan PAGU Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) sebesar Rp.10.350.000,- yang diambil dari sisa belanja Pengadaan Mobil Kendaraan Dinas, dan Penambahan PAGU Anggaran Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) karena adanya penambahan sampel kegiatan beberapa survei baru dan tambahan biaya kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Wilkerstat dengan nilai sebesar Rp. 558.449.000,- .

Dalam Revisi DIPA ke-5 pada bulan Juli 2019 terjadi efisiensi/penghematan anggaran pada Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) sebesar Rp. 54.200.000,- yang dialihkan untuk menambahkan kekurangan tunjangan fungsional pegawai pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

(DMPTTL) . Meskipun pada saat yang sama juga terjadi penambahan anggaran pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) sebesar Rp.35.000.000,- untuk kebutuhan biaya pemasangan meteran daya listrik PLN.

Usaha efisiensi/penghematan anggaran dilakukan lagi pada revisi anggaran ke-7 di bulan September 2019 pada Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) sebesar Rp. 645.415.000,- yang dialihkan untuk menutupi kekurangan gaji pegawai pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL), akibat terjadinya inpassing/kenaikan gaji pegawai tahun 2019 sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019, sehingga pada saat itu BPS Kabupaten Bandung hanya membutuhkan tambahan anggaran lebih kecil, yaitu sebesar Rp. 177.708.000,- dari Total kekurangan yang dibutuhkan sebesar Rp. 788.123.000,-.

Tabel 21. Rincian Revisi DIPA Anggaran Tahun 2019

Revisi Ke -	Tanggal Pengesahan	Uraian/Program	Pagu Awal (Rp.)	Pagu Revisi (Rp.)	Selisih (Rp.)
01	21 Januari 2019	Revisi DIPA Satker	12.880.017.000	12.880.017.000	0
		DMPTTL	4.617.147.000	4.617.147.000	0
		PSPA	309.350.000	309.350.000	0
		PPIS	7.953.520.000	7.953.520.000	0
02	05 Maret 2019	Revisi DIPA Satker	12.880.017.000	12.880.017.000	0
		DMPTTL	4.617.147.000	4.617.147.000	0
		PSPA	309.350.000	309.350.000	0
		PPIS	7.953.520.000	7.953.520.000	0
03	2 Mei 2019	Revisi DIPA Antar Satker	12.880.017.000	13.428.116.000	548.099.000
		DMPTTL	4.617.147.000	4.617.147.000	0
		PSPA	309.350.000	299.000.000	-10.350.000
		PPIS	7.953.520.000	8.511.969.000	558.449.000
04	31 Mei 2019	Revisi DIPA Satker	13.428.116.000	13.428.116.000	0
		DMPTTL	4.617.147.000	4.617.147.000	0
		PSPA	299.000.000	299.000.000	0
		PPIS	8.511.969.000	8.511.969.000	0
05	10 Juli 2019	Revisi DIPA antar Satker	13.428.116.000	13.463.116.000	35.000.000
		DMPTTL	4.617.147.000	4.671.347.000	54.200.000

Revisi Ke -	Tanggal Pengesahan	Uraian/Program	Pagu Awal (Rp.)	Pagu Revisi (Rp.)	Selisih (Rp.)
		PSPA	299.000.000	334.000.000	35.000.000
		PPIS	8.511.969.000	8.457.769.000	-54.200.000
06	12 Agustus 2019	Revisi POK dalam satker	13.463.116.000	13.463.116.000	0
		DMP TTL	4.671.347.000	4.671.347.000	0
		PSPA	334.000.000	334.000.000	0
		PPIS	8.457.769.000	8.457.769.000	0
07	26 September 2019	Revisi DIPA antar Satker	13.428.116.000	13.605.824.000	177.708.000
		DMP TTL	4.671.347.000	5.459.470.000	788.123.000
		PSPA	334.000.000	334.000.000	0
		PPIS	8.457.769.000	7.812.354.000	-645.415.000
08	20 Nopember 2019	Revisi DIPA Satker	13.605.824.000	13.605.824.000	0
		DMP TTL	5.459.470.000	5.459.470.000	0
		PSPA	334.000.000	334.000.000	0
		PPIS	7.812.354.000	7.812.354.000	0

Proses Revisi DIPA di BPS Kabupaten Bandung telah berhasil meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran belanja yang telah ditetapkan, dengan total efisiensi/penghematan sebesar Rp. 709.965.000,-.

3.7. Kinerja Anggaran Tahun 2019.

Pagu yang diberikan kepada satker BPS Kabupaten Bandung untuk menjalankan fungsi pemerintahan sampai dengan akhir tahun 2019 adalah sebesar Rp. 13.605.824,-. Anggaran kegiatan 2019 tersebut diarahkan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Nasional BPS. Badan Pusat Statistik memiliki 4 (empat) program anggaran, namun pada satker BPS Kabupaten Bandung sendiri hanya terdapat 3 (tiga) program, yaitu:

1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Program teknis BPS ini bertujuan untuk menyediakan informasi statistik melalui kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, pengkajian dan analisis statistik, serta diseminasi data dan informasi statistik secara terus menerus guna menjamin kesinambungan

penyediaan data statistik yang lengkap, akurat, dan tepat waktu dibidang sosial budaya, ekonomi, kependudukan, dan lingkungan.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL). Program Generik BPS ini bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas dengan strategi yang dilakukan adalah: (a) Meningkatkan Kapasitas SDM; (b) Penataan Kelembagaan dalam rangka reformasi birokrasi dan mewujudkan good governance; dan (c) Peningkatan akuntabilitas penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan.
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA). Program Generik ini bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk pusat dan daerah.

Nilai Pagu anggaran pada tahun 2019 mengalami peningkatan Pagu Anggaran sebesar 88.74 persen atau bertambah sebesar Rp. 6.397.260. 000,-, jika dibandingkan dengan nilai pagu anggaran pada tahun 2018 (sebesar Rp. 7.208.564.000,-). Hal ini dapat dilihat pada tabel rincian perbandingan Pagu anggaran tahun 2018 dan 2019 menurut program di bawah ini.

Dibandingkan dengan tahun 2018, Kenaikan Pagu anggaran tahun 2019 yang terbesar terdapat pada Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS), yaitu naik Rp. 6.128.328.000 atau sebesar 363,91 %. Hal ini disebabkan karena adanya tambahan sampel kegiatan survei tahun 2019, dan terutama karena adanya kegiatan persiapan Sensus Penduduk 2020 (SP2020), yaitu berupa kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Wilkerstat SP2020 yang banyak melibatkan para petugas Mitra Statistik, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.972.772. 000,-.

**Tabel 22. Perbandingan Pagu Anggaran
BPS Kabupaten Bandung Tahun 2018-2019**

Jenis Program	PAGU akhir Tahun 2018	PAGU akhir Tahun 2019	Selisih	% Kenaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL)	5.304.713.000	5.459.470.000	154.757.000	2,92
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA)	219.825.000	334.000.000	114.175.000	51,94
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)	1.684.026.000	7.812.354.000	6.128.328.000	363,91
Jumlah	7.208.564.000	13.605.824.000	6.397.260.000	88,75

Kenaikan Pagu anggaran 2019 pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) sebesar Rp. 114.175.000,- atau 51,94 % karena adanya belanja Pengadaan Mobil Kendaraan Dinas dan Biaya Pemasangan meteran Listrik PLN. Sedangkan pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL) anggaran tahun 2019 naik sebesar Rp. 154.757.000,- atau 2,92 %, lebih banyak disebabkan oleh adanya kebijakan inpassing/kenaikan gaji pegawai tahun 2019 secara Nasional sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019

Berdasarkan Tingkat Penyerapan anggaran BPS Kabupaten Bandung tahun 2019 pada Tabel 23 dapat dilihat bahwa secara keseluruhan adalah sebesar 98,10 persen dari total pagu tersedia. Rincian realisasi daya serap anggaran menurut program, masing masing adalah sebagai berikut : 98,62 persen untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL), 99,57 persen untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA) dan 97,67 persen untuk

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Penyerapan program Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) paling kecil diantara program yang lainnya, sedangkan penyerapan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA) paling besar dibandingkan program yang lainnya. Tingginya daya serap Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA) ini disebabkan oleh adanya tambahan belanja modal pemasangan meteran listrik menjelang akhir tahun dan kebijakan penghematan/efisiensi anggaran PSPA.

Tabel 23. Realisasi Penyerapan Anggaran dan Sisa Anggaran Tahun 2019 Menurut Program

Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase Sisa (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL)	5.459.470.000	5.384.089.774	98,62	75.380.226	1,38
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA)	334.000.000	332.563.000	99,57	1.437.000	0,43
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)	7.812.354.000	7.630.434.548	97,67	181.919.452	2,33
Total	13.605.824.000	13.347.087.322	98,10	258.736.678	1,90

Pada tabel 24 dapat dilihat bahwa secara keseluruhan telah terjadi peningkatan daya serap anggaran sebesar 0,42 persen. Capaian kinerja anggaran berdasarkan persentase daya serap anggaran total pada tahun 2019 sebesar 98,10 persen. Hal ini lebih baik dibandingkan dengan daya serap tahun 2018 dengan nilai sebesar 97,68 persen.

Adapun peningkatan daya serap anggaran pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 terjadi pada Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS), dengan peningkatan nilai sebesar 5,53 persen. Sedangkan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA) dan Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL) mengalami sedikit penurunan persentase daya serap, masing-masing sebesar 0,74 persen dan 0,05 persen.

Peningkatan daya serap pada Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) pada tahun 2019, naik sebesar 5,53 persen dan menjadi yang tertinggi tingkat kenaikan daya serapnya, disebabkan pada tahun 2019 terdapat tambahan sampel kegiatan pada beberapa survei tahun 2019, dan terutama karena adanya kegiatan cukup besar yang banyak melibatkan para petugas Mitra Statistik, yaitu kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Wilkerstat SP2020 .

Tabel 24. Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran 2018-2019 Menurut Program

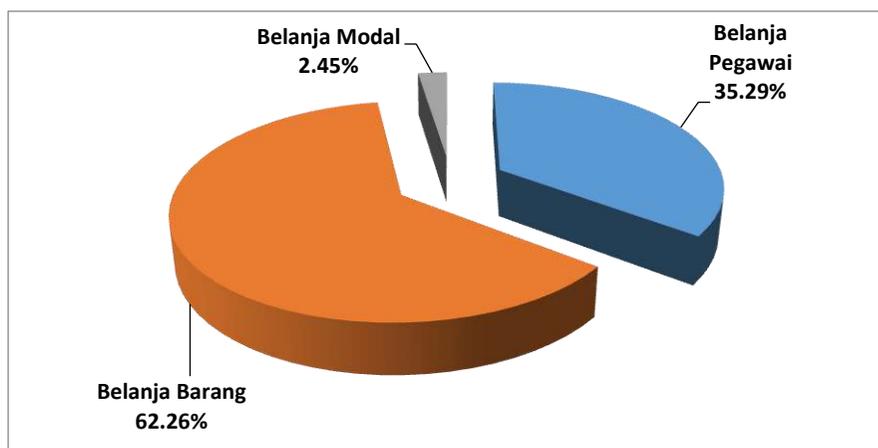
Program	Tahun 2018			Tahun 2019			Selisih Realisasi (%)
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL)	5.304.713.000	5.270.750.119	99,36	5.459.470.000	5.384.089.774	98,62	(0,74)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA)	219.825.000	219.000.000	99,62	334.000.000	332.563.000	99,57	(0,05)
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)	1.684.026.000	1.551.754.702	92,15	7.812.354.000	7.630.434.548	97,67	5,53
Total	7.208.564.000	7.041.504.821	97,68	13.605.824.000	13.347.087.322	98,10	0,42

Berdasarkan data pada tabel 25 di bawah ini, tingkat penyerapan anggaran menurut jenis belanja pada tahun 2019, nilai daya serap anggaran tertinggi terdapat pada belanja modal sebesar 99,57 persen, disusul dengan belanja pegawai sebesar 99,47 persen dan nilai daya serap paling rendah pada jenis belanja barang sebesar 97,26 persen. Tingginya daya serap Belanja modal ini disebabkan oleh adanya tambahan belanja modal pemasangan meteran listrik menjelang akhir tahun dan kebijakan penghematan/efisiensi anggaran pada Anggaran Belanja Modal.

Tabel 25. Realisasi Penyerapan Anggaran dan Sisa Anggaran Tahun 2019 Menurut Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase Sisa (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
51. Belanja Pegawai	4.800.956.000	4.775.673.743	99,47	25.282.257	0,53
52. Belanja Barang	8.470.868.000	8.238.850.579	97,26	232.017.421	2,74
53. Belanja Modal	334.000.000	332.563.000	99,57	1.437.000	0,43
Total	13.605.824.000	13.347.087.322	98,10	258.736.678	1,90

Berdasarkan komposisi pagu anggaran BPS Kabupaten Bandung tahun 2019, pagu anggaran tertinggi terdapat pada anggaran belanja barang sebesar 62,26 persen dan pagu anggaran terendah pada pagu anggaran belanja modal sebesar 2,45 persen. Sedangkan pagu anggaran belanja pegawai mencapai 35,29 persen.

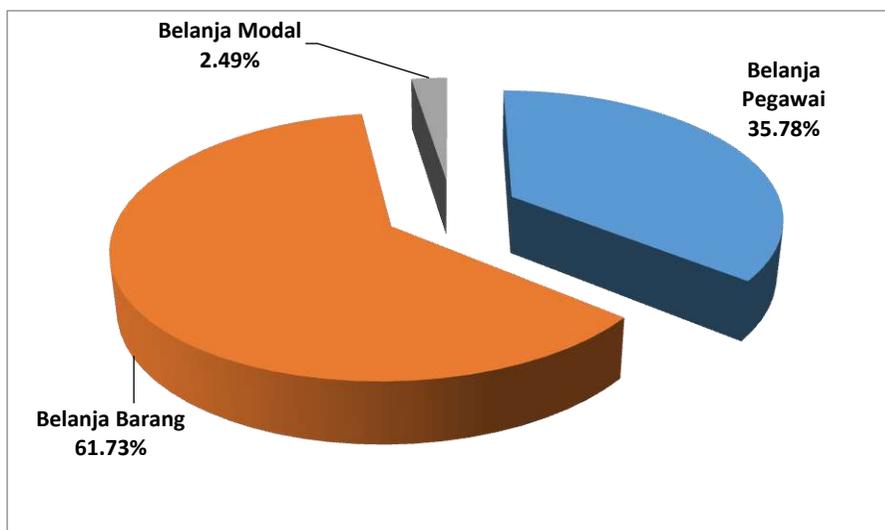


Gambar 21. Komposisi Alokasi Anggaran Belanja BPS Kabupaten Bandung Tahun 2019

Seperti halnya pada komposisi pagu anggaran BPS Kabupaten Bandung tahun 2019, komposisi realisasi belanja tertinggi terdapat pada anggaran belanja barang sebesar 61,73 persen dan realisasi belanja anggaran terendah pada realisasi anggaran

belanja modal sebesar 2,49 persen. Sedangkan pagu anggaran belanja pegawai mencapai 35,78 persen.

Jika melihat jumlah komposisi anggaran belanja modal dan belanja barang BPS Kabupaten Bandung pada tahun 2019 sebesar 64,22 persen jauh lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai sebesar 35,78 persen. Tingginya persentase belanja modal dan belanja barang ini diharapkan dapat mendorong peningkatan laju perekonomian di daerah, khususnya di Kabupaten Bandung sesuai dengan tujuan Program Pemerintah Pusat.



Gambar 22. Komposisi Realisasi Anggaran Jenis Belanja BPS Kabupaten Bandung Tahun 2019

Sejak berlakunya sistem penganggaran berbasis kinerja mendorong setiap Kementerian/Lembaga (K/L) untuk meningkatkan efisiensi penganggaran, setiap rupiah yang dikeluarkan harus diimbangi dengan kinerja yang dihasilkan.

Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran BPS Kabupaten Bandung tahun 2019, dihitung dengan membandingkan antara Realisasi penyerapan anggaran menurut Output, dengan capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Kinerja dapat dilihat pada tabel 22 di bawah ini.

Tingkat efisiensi anggaran tertinggi dicapai oleh Tujuan strategis ***Penguatan Sistem Statistik Nasional Melalui Koordinasi Dan Pembinaan Yang Efektif Di Bidang Statistik*** dengan nilai sebesar 21,31 persen, diikuti oleh tujuan Peningkatan Pelayanan Prima Hasil Kegiatan Statistik sebesar 13,88 persen, kemudian tujuan ***Peningkatan Kualitas Data Statistik*** sebesar 13,43 persen, dan Tingkat efisiensi anggaran terendah dicapai oleh tujuan ***Peningkatan Birokrasi Yang Akuntabel*** sebesar 3,56 persen.

Rendahnya tingkat efisiensi anggaran tujuan strategis ***Peningkatan Birokrasi Yang Akuntabel*** disebabkan karena Persentase Capaian kinerja tujuan keempat tersebut dengan indikator tujuan *Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat BPS*, meskipun capaian kinerja Penilaian SAKIP tahun ini telah meningkat dibandingkan capaian tahun 2018. Dalam hal ini masih diperlukan usaha keras dari seluruh pegawai BPS Kabupaten Bandung untuk terus meningkatkan poin hasil penilaian SAKIPnya. Namun demikian jika melihat lebih jauh pada tujuan keempat sasaran yang kedua, yaitu *Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS* tingkat efisiensi anggarannya cukup tinggi, telah mencapai sebesar 8,01 persen.

Berdasarkan tabel 26, Jika melihat hasil rata-rata efisiensi penggunaan anggaran baik berdasarkan tujuan maupun sasaran strategis, masing-masing mencapai nilai sebesar 11,43 persen dan 9,39 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum BPS Kabupaten Bandung dapat menggunakan anggaran secara efektif dan berhasil melakukan efisiensi penganggaran dalam mencapai target kinerja tahun 2019 sesuai tujuan dari sistem penganggaran yang berbasis kinerja.

Tabel 26. Tingkat Efisiensi Anggaran berdasarkan Tingkat Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran terhadap Realisasi Anggaran BPS Kabupaten Bandung Tahun 2019

Tujuan	Sasaran	Kode dan Uraian Jenis Program/Kegiatan/Output	% Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	% Realisasi Anggaran	Efisiensi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1. Peningkatan kualitas data statistik			111,11	7.755.574.000	7.575.502.548	97,68	13,43	
	1.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS		104,66	7.755.574.000	7.575.502.548	97,68	6,98	
		054.01.06 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik			7.755.574.000	7.575.502.548	97,68	
		2895.006	Publikasi/Laporan Kependudukan Dan Ketenagakerjaan		362.171.000	354.242.659	97,81	
		2895.009	Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat		439.031.000	434.601.000	98,99	
		2895.010	Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial		24.666.000	18.871.137	76,51	
		2895.011	Publikasi/Laporan Pendataan Potensi Desa		58.452.000	53.117.860	90,87	
		2895.014	Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, Dan Kehutanan		7.620.000	4.405.000	57,81	
		2895.015	Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan Dan Penggalian, Energi, Dan Konstruksi		242.481.000	222.349.018	91,70	
		2895.016	Publikasi/Laporan Statistik Distribusi		3.336.000	2.070.000	62,05	
		2895.018	Publikasi/Laporan Updating Direktori Pasar Dan Pusat Perdagangan		510.000	510.000	100,00	
		2895.020	Publikasi/Laporan Statistik Harga		26.756.000	26.096.000	97,53	
		2895.023	Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, TI, Dan Pariwisata		27.779.000	27.454.000	98,83	
		2895.024	Publikasi/Laporan Neraca Produksi		10.482.000	9.828.500	93,77	
		2895.025	Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran		34.136.000	31.811.000	93,19	
		2895.026	Publikasi/Laporan Analisis Dan Pengembangan Statistik		31.558.000	30.285.000	95,97	
		2895.027	Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan		99.954.000	39.810.310	39,83	
		2895.028	Publikasi/Laporan Statistik Hortikultura Dan Perkebunan		21.848.000	8.800.000	40,28	
		2895.029	Publikasi/Laporan Indeks Kemahalan Konstruksi		10.025.000	9.264.000	92,41	
		2895.030	Publikasi/Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah		10.475.000	9.793.000	93,49	
		2895.032	Publikasi/ Laporan Sensus Penduduk		5.972.772.000	5.933.527.494	99,34	
		2895.034	Publikasi/ Laporan Pmb Institusi Dan Lapangan Usaha		30.582.000	27.975.000	91,48	
		2895.035	Publikasi/ Laporan Statistik Wisatawan Nusantara		70.506.000	68.501.500	97,16	
		2895.038	Publikasi/ Laporan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi Dengan Kerangka Sampel Area		270.434.000	262.190.070	96,95	
2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik				110,52	53.720.000	51.912.000	96,63	13,88
	2.1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)		103,67	53.720.000	51.912.000	96,63	7,04	
		054.01.06 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik			53.720.000	51.912.000	96,63	
2895.004		Laporan Diseminasi Statistik		53.720.000	51.912.000	96,63		
3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik			120,00	3.060.000	3.020.000	98,69	21,31	
	3.1. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SNN manajemen sumberdaya manusia BPS		120,00	3.060.000	3.020.000	98,69	21,31	
		054.01.06 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik			3.060.000	3.020.000	98,69	
		2895.005	Laporan Metadata Statistik		3.060.000	3.020.000	98,69	
4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel			102,23	5.793.470.000	5.716.652.774	98,67	3,56	
	4.1 Meningkatnya birokrasi yang akuntabel		102,23	5.459.470.000	5.384.089.774	98,62	3,61	
		054.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS			5.459.470.000	5.384.089.774	98,62	
		2886.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker		38.755.000	27.873.750	71,92	
	2886.994	Layanan Perkantoran		5.420.715.000	5.356.216.024	98,81		
	4.2 Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS			107,58	334.000.000	332.563.000	99,57	8,01
		054.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS			334.000.000	332.563.000	99,57	
2891.951		Layanan Sarana dan Prasarana Internal		334.000.000	332.563.000	99,57		
Nilai Rata-rata Efisiensi Anggaran Tujuan Strategis							11,43	
Nilai Rata-rata Efisiensi Anggaran Sasaran Strategis							9,39	

Pada tahun 2018 kementerian Keuangan melalui Sistem Aplikasi OM-SPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara), telah mulai melakukan Penilaian Kinerja dalam pelaksanaan anggaran seluruh satker Kementerian dan Lembaga pemerintah Pusat setiap bulan terkait dengan kepatuhan terhadap jadwal dan ketertiban pengelolaan anggaran sesuai dengan peraturan keuangan yang berlaku, melalui penilaian 12 (dua belas) Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA), yang terdiri dari :

1. Pengajuan UP dan TUP (Kesesuaian Nilai dan jadwal penggunaan UP/TUP)
2. Data Kontrak (Ketertiban pengajuan Data Kontrak LS pihak ketiga)
3. Kesalahan SPM (Banyak tingkat kesalahan dalam pengajuan SPM)
4. Retur SP2D (Tingkat penolakan dan Pengembalian SP2D)
5. Halaman III DIPA (Kesesuaian Rencana Penarikan Dana dengan realisasi)
6. Revisi DIPA (Jumlah Revisi DIPA yang dilakukan dalam setahun)
7. Penyelesaian Tagihan (Ketertiban dan kepatuhan jadwal penyelesaian tagihan)
8. Rekon LPJ (Ketertiban dan kepatuhan Rekon dan pelaporan LPJ sesuai jadwal)
9. Renkas (Kesesuaian Rencana Kas)
10. Pagu Minus (Penyelesaian PAGU Minus)
11. Realisasi (Besaran realisasi anggaran)
12. Dispensasi SPM (Tingkat Penggunaan Dispensasi SPM)

Pada penilaian IKPA satker tahun 2019 terdapat perbedaan dengan penilaian tahun 2018, dengan penambahan penilaian 1 (satu) indikator yaitu indikator Rekon LPJ, namun untuk indikator Renkas masih belum dilakukan, jadi hanya mempertimbangkan 11 indikator saja.

Hal lain yang agak berbeda dalam proses penilaian IKPA pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 adalah terjadinya perubahan bobot penilaian yang pada indikator-indikator pelaksanaan anggaran yang dinilai, dengan rincian pada tabel 27 berikut.

Tabel 27. Perubahan Bobot Penilaian Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA) Tahun 2019 dan Tahun 2018

No	Jenis Penilaian	<i>Bobot (%) Tahun 2019</i>	<i>Bobot (%) Tahun 2018</i>	<i>Selisih Bobot (%)</i>
1	Pengelolaan UP	10	10	-
2	Data Kontrak	15	10	5
3	Kesalahan SPM	6	5	1
4	Retur SP2D	6	5	1
5	Hal III DIPA	5	5	-
6	Revisi DIPA	5	5	-
7	Penyelesaian Tagihan	15	20	(5)
8	Rekon LPJ	5	0	5
9	Renkas	0	0	-
10	Realisasi	20	20	-
11	Pagu Minus	4	5	(1)
12	Dispensasi SPM	4	5	(1)
Konversi Bobot (%)		95	90	5

Hasil penilaian Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA) yang dilakukan oleh Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI terhadap seluruh satker dilakukan secara rutin dengan perhitungan kumulatif setiap bulan. Hasil penilaian Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA) dapat dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran oleh setiap satuan kerja yang dapat diakses melalui Sistem Aplikasi OM-SPAN pada alamat website <https://spanint.kemenkeu.go.id/>

Hasil pengukuran Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA) tahun 2019 yang dilakukan oleh Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI terhadap satker BPS Kabupaten Bandung, sebagaimana yang terlihat pada tabel 28 diperoleh Nilai akhir masing-masing indikator IKPA sebagai berikut : Pengelolaan UP/TUP 10,00, Penyelesaian Data Kontrak 9,45 , Kesalahan SPM 5,10 , Retur SP2D 6,00, RPD Hal III DIPA 4,73 , Revisi DIPA 5,00, Penyelesaian Tagihan 15 , Realisasi 20,00 , Pagu Minus 4,00 dan Dispensasi SPM 4 , dengan Nilai Total sebesar 89,27 dan Jumlah Nilai akhir IKPA sebesar 92,93 .

**Tabel 28. Hasil Pengukuran Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA)
BPS Kabupaten Bandung Tahun 2019**

No	Indikator Penilaian	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengelolaan UP	100.00	10	10.00
2	Data Kontrak	63.00	15	9.45
3	Kesalahan SPM	85.00	6	5.10
4	Retur SP2D	100.00	6	6.00
5	Hal III DIPA	94.61	5	4.73
6	Revisi DIPA	100.00	5	5.00
7	Penyelesaian Tagihan	100.00	15	15.00
8	Rekon LPJ	100.00	5	5.00
9	Renkas	0.00	0	0.00
10	Realisasi	100.00	20	20.00
11	Pagu Minus	100.00	4	4.00
12	Dispensasi SPM	100.00	4	4.00
Nilai Total				88.28
Konversi Bobot				95%
Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)				92.93

Tabel 29 memperlihatkan perbandingan hasil penilaian IKPA tahun 2018 dengan hasil penilaian IKPA 2019 . Hasil penilaian IKPA tahun 2019 pada 4 (empat) indikator, yaitu : Pengelolaan UP, Revisi DIPA, Renkas, dan Realisasi tidak terjadi perubahan nilai IKPA karena telah tercapai sesuai nilai maksimal bobot penilaian masing-masing indikator.

Hal yang cukup menggembirakan adalah terjadinya peningkatan pada 3 (tiga) indikator IKPA, yaitu : Kesalahan SPM (naik 0,56 poin), Retur SP2D (naik 1,00 poin), Hal III DIPA (naik 0,01 poin) dan Rekon LPJ (naik 5,00 poin). Namun pada indikator lainnya terjadi juga penurunan hasil penilaian IKPA pada 4 (empat) indikator, yaitu : Data Kontrak (turun 0,55 poin), Penyelesaian Tagihan (turun 5,00 poin), Pagu Minus (turun 1,00 poin) dan Dispensasi SPM (turun 1,00 poin).

Terjadinya penurunan nilai indikator Data Kontrak tahun 2019 sebesar 0,55 poin disebabkan karena keterlambatan pihak penyedia dalam melengkapi dokumen administrasi pada saat pengadaan Kendaraan mobil dinas. Sedangkan penurunan nilai indikator pada 3 (tiga) indikator disebabkan karena terjadi peningkatan bobot indikator-indikator tersebut pada penilaian IKPA tahun 2019.

Hasil penilaian IKPA tahun 2018 dan hasil penilaian IKPA 2019 sebelum bobot tertimbang masing-masing sebesar 88,28 dan 89,27, sehingga terjadi penurunan sebesar 0,99 poin. Namun dengan adanya peningkatan bobot tertimbang tahun 2019 menjadi 95, sehingga nilai hasil akhir tahun 2019 menjadi sebesar 92,93 atau turun sebesar 6,26 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

**Tabel 29. Perbandingan Nilai Indikator Pelaksana Kinerja Anggaran (IKPA)
BPS Kabupaten Bandung Tahun 2018-2019**

No	Jenis Penilaian	2019			2018			Selisih
		Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pengelolaan UP	100,00	10	10,00	100,00	10	10,00	-
2	Data Kontrak	63,00	15	9,45	100,00	10	10,00	(0,55)
3	Kesalahan SPM	85,00	6	5,10	90,89	5	4,54	0,56
4	Retur SP2D	100,00	6	6,00	100,00	5	5,00	1,00
5	Hal III DIPA	94,61	5	4,73	94,49	5	4,72	0,01
6	Revisi DIPA	100,00	5	5,00	100,00	5	5,00	-
7	Penyelesaian Tagihan	100,00	15	15,00	100,00	20	20,00	(5,00)
8	Rekon LPJ	100,00	5	5,00	100,00	0	0,00	5,00
9	Renkas	-	0	-	0,00	0	0,00	-
10	Realisasi	100,00	20	20,00	100,00	20	20,00	-
11	Pagu Minus	100,00	4	4,00	100,00	5	5,00	(1,00)
12	Dispensasi SPM	100,00	4	4,00	100,00	5	5,00	(1,00)
Nilai Total				88,28			89,27	(0,99)
Konversi Bobot (%)				95			90	5,00
Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)				92,93			99,19	(6,26)

Hasil penilaian akhir penilaian Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA) BPS Kabupaten Bandung sudah di atas 90,00, menunjukkan bahwa satker BPS Kabupaten Bandung sudah termasuk dalam kategori penilaian satker yang telah melaksanakan anggaran dengan relatif baik, meskipun pada beberapa indikator penilaian IKPA yang masih dibawah nilai 90,00 perlu lebih ditingkatkan lagi kinerja pengelolaannya, seperti pada indikator penilaian Data kontrak dan Kesalahan SPM.

3.8. Penghargaan atas Prestasi yang diperoleh tahun 2019

Pada tahun 2019 satker BPS Kabupaten Bandung telah memperoleh beberapa penghargaan atas prestasi kinerja baik para pegawai BPS Kabupaten Bandung dalam penyelesaian tugas dan fungsinya. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kantor Perbendaharaan (DJPb) Wilayah Provinsi Jawa Barat, Kantor Kas dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung II, Badan Pusat Statistik RI, dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, dengan rincian Piagam penghargaan yang diperoleh sebagai berikut :

1. Piagam Penghargaan ***Peringkat keempat Satker Terbaik Kategori DIPA Kecil Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA) Wilayah KPPN Bandung I dan KPPN Bandung II Semester II 2018***. Penghargaan diberikan oleh Kantor Perbendaharaan (DJPb) Wilayah Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 26 Maret 2019.
2. Piagam Penghargaan ***Satker Terbaik Peringkat I Kategori DIPA Kecil berdasarkan Capaian Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA) Tahun 2018 Wilayah KPPN Bandung II***. Penghargaan diberikan oleh Kantor Kas dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung II, pada tanggal 20 Maret 2019.
3. Sertifikat Penghargaan ***Satker Terbaik Peringkat ke-3 Pengelolaan ARC (Advance Release Calender) Publikasi dan Daerah Dalam Angka Tahun 2018 Tingkat Kabupaten/Kota se-Indonesia***. Penghargaan diberikan oleh Badan Pusat Statistik RI, pada tanggal 12 September 2019.
4. Piagam Penghargaan ***Apresiasi dan Penghargaan atas Partisipasi dengan Judul Film Factor X pada Indonesian Census Film Festival Tahun 2019 (ICFF2019)*** . Penghargaan diberikan oleh Badan Pusat Statistik RI, pada tanggal 1 Februari 2019.

5. Piagam Penghargaan ***BPS Kabupaten/Kota Terbaik Bidang Statistik Sosial Tahun 2019***. Penghargaan diberikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat pada tanggal 13 Desember 2019.
6. Piagam Penghargaan ***BPS Kabupaten/Kota Terbaik Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Tahun 2019***. Penghargaan diberikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat pada tanggal 13 Desember 2019.
7. Piagam Penghargaan ***BPS Kabupaten/Kota dengan Pengelolaan Administrasi Ketatausahaan Terbaik Tahun 2019***. Penghargaan diberikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat pada tanggal 22 Oktober 2019.
8. Piagam Penghargaan ***BPS Kabupaten/Kota Terbaik Bagian Tata Usaha Tahun 2019***. Penghargaan diberikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat pada tanggal 13 Desember 2019.

Salinan Piagam-piagam Penghargaan yang diterima satker BPS Kabupaten Bandung pada tahun 2019 tersebut sebagaimana terlampir pada lampiran 8.

PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum

BPS Kabupaten Bandung pada tahun 2019 mempunyai 4 (empat) tujuan yang harus dicapai, yaitu: (1) Peningkatan kualitas data statistik (2) Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik, (3) Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik, dan (4) Peningkatan birokrasi yang akuntabel. Masing-masing tujuan tersebut terbagi ke dalam beberapa sasaran strategis yang lebih rinci.

Secara keseluruhan capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis BPS Kabupaten Bandung tahun 2019 relatif telah dapat tercapai dengan baik, yang dicerminkan oleh nilai capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis yang relatif tinggi, dengan nilai capaian secara rata-rata telah melebihi antara 2 persen sampai 20 persen di atas target akhir renstra.

Perkembangan capaian kinerja dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, mengalami trend atau kecenderungan kenaikan yang positif, namun demikian BPS Kabupaten Bandung harus senantiasa berupaya keras untuk meningkatkan kinerjanya dari tahun ke tahun, terutama upaya peningkatan pada indikator-indikator sasaran yang masih memiliki nilai capaian belum penuh .

Perbandingan antara capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan penyerapan anggaran tahun 2019, diperoleh rata-rata persentase Capaian Kinerja BPS Kabupaten Bandung lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi penyerapan anggaran, dengan rata-rata efisiensi anggaran sasaran dan tujuan adalah sebesar 11,43 persen dan 9,39 persen. Hal ini berarti tujuan efektifitas dan efisiensi sistem penganggaran berbasis kinerja telah dapat tercapai dengan baik.

4.2. Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang perlu dilakukan guna perbaikan di tahun mendatang adalah:

- (1) Perlu usaha yang lebih keras lagi dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Tujuan Keempat, yaitu ***Peningkatan Birokrasi Yang Akuntabel***, khususnya pada sasaran *Meningkatnya Birokrasi Yang Akuntabel* dengan indikator sasaran *Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat BPS* dengan memperbaiki sistem kerja dan melengkapi arsip dokumentasi yang dibutuhkan dalam meningkatkan point penilaian SAKIP.
- (2) Perlu usaha pendekatan dan sosialisasi yang lebih lagi dalam rangka meningkatkan *respon rate*, khususnya untuk responden rumah tangga dan responden usaha untuk meningkatkan capaian kinerja pada indikator “Persentase pemasukan dokumen dengan pendekatan rumah tangga dan usaha”.
- (3) Melakukan *review*/peninjauan nilai target pada indikator sasaran, yaitu “Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS” dengan mempertimbangkan hasil evaluasi nilai realisasi pada tahun 2019 dengan tetap mempertimbangkan Target Renstra berikutnya.
- (4) Melakukan penajaman (peningkatan) target kinerja pada beberapa indikator sasaran yang telah memiliki capaian kinerja jauh di atas 100 persen. Penajaman target kinerja ini disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi nilai realisasi pada tahun 2019 dengan tetap mempertimbangkan Target Renstra berikutnya. Usaha penajaman (peningkatan) target kinerja diharapkan akan menjadi pendorong bagi para pegawai BPS Kabupaten Bandung untuk dapat berkinerja jauh lebih baik lagi.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1. Rencana Strategis (Renstra) BPS Kabupaten Bandung 2015-2019

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA				
	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SS.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS					
1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	80%	75%	85%	90%	90%
1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	80%	75%	75%	65%	65%
1.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	95%	100%	100%	100%	100%
1.4. Jumlah Publikasi /laporan yang tepat waktu	34	47	88	56	56
1.5. Jumlah Publikasi/Laporan Sensus yang terbit tepat waktu	1	1	1	1	1
1.6. Persentase Pemasukan Dokumen (<i>Respon Rate</i>) Survei	92,33%	98,67%	97,65%	99,16%	99,16%
SS.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>user engagement</i>)					
2.1. Jumlah Pengunjung Eksternal yang mengakses Data dan Informasi Statistik melalui website BPS	30.000	30.000	15.000	20.000	21.000
2.2. Persentase Konsumen yang menggunakan Data BPS dalam perencanaan dan evaluasi Pembangunan Nasional	25%	25%	75%	35%	37%

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA				
	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.3. Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS	80%	75%	85%	85%	85%
SS.3. Meningkatnya Koordinasi dan Kerjasama dalam Penyelenggaraan SSN					
3.1. Jumlah Meta Data Kegiatan Statistik Sektoral dan Khusus yang dihimpun	-	-	10	10	12
SS.4. Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel					
4.1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	67	63	60	60	60
SS.5. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana BPS					
5.1. Persentase Pengguna Layanan yang merasa Puas terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan Prasarana BPS	80%	75%	73%	75%	75%
5.2. Persentase Pengadaan sarana dan Prasarana Aparatur yang diselesaikan	100%	75%	100%	-	100%

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANDUNG



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Ruslan
Jabatan : Kepala BPS Kabupaten Bandung

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Dody Herlando, M.Econ.
Jabatan : Kepala BPS Provinsi Jawa Barat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 18 Februari 2019

Pihak Kedua

Ir. Dody Herlando, M.Econ.
NIP. 19640726 198601 1 001

Pihak Pertama

Ir. Ruslan
NIP. 19620109 198601 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BPS KABUPATEN BANDUNG.**

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Peningkatan kualitas data statistik	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	90
1.1.Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	90
	Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	Persen	65
	Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	Persen	100
	Jumlah Release Data yang tepat waktu	Aktivitas	0
	Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu	Publikasi	90
	Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu	Publikasi	1
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei	Persen	95,76
	- Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan rumah tangga	Persen	100
- Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan usaha	Persen	88,35	
- Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	Persen	99,95	
2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS	Persen	85
2.1.Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>user engagement</i>)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS	Pengunjung	26.000
	Persentase konsumen yang	Persen	85

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	puas terhadap akses data BPS		
	Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	35
3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	Metadata	12
3.1. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN manajemen sumber daya manusia BPS	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	Metadata	12
4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Point	60
4.1 Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Point	60
	Jumlah Satker BPS Kabupaten/Kota Yang Berpredikat WBK/WBBM	Satker	0
4.2 Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS	Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	Persen	75
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan	Persen	100

Program

Anggaran

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS | Rp. 4.617.147.000,- |
| 2. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik | Rp. 7.953.520.000,- |
| 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS | Rp. 309.350.000,- |

Kepala BPS Provinsi Jawa Barat

Ir. Dody Herlando, M.Econ.
NIP. 19640726 198601 1 001

Bandung, 18 Februari 2019

Kepala BPS Kabupaten Bandung

Ir. R. R. R.
NIP. 19620109 198601 1 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANDUNG



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
(REVIEW)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Ruslan
Jabatan : Kepala BPS Kabupaten Bandung

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Dody Herlando, M.Econ.
Jabatan : Kepala BPS Provinsi Jawa Barat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 17 Desember 2019

Pihak Kedua

(Ir. Dody Herlando, M.Econ.)
NIP. 19640726 198601 1 001

Pihak Pertama

(Ir. Ruslan)
NIP. 19620109 198601 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BPS KABUPATEN BANDUNG.
(REVIEW)**

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Peningkatan kualitas data statistik	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	90
1.1.Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persen	90
	Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	Persen	65
	Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	Persen	100
	Jumlah Release Data yang tepat waktu	Aktivitas	0
	Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu	Publikasi	35
	Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu	Publikasi	1
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei	Persen	98,24
	- Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan rumah tangga	Persen	100,00
	- Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan usaha	Persen	93,59
- Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha	Persen	99,52	
2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS	Persen	85
2.1.Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>user engagement</i>)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS	Pengunjung	26.000
	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS	Persen	85

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	35
3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	Metadata	12
3.1. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN manajemen sumber daya manusia BPS	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	Metadata	12
4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Point	60
4.1 Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Point	60
	Jumlah Satker BPS Kabupaten/Kota Yang Berpredikat WBK/WBBM	Satker	0
4.2 Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS	Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	Persen	75
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan	Persen	100

Program

Anggaran

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS | Rp. 5.459.470.000,- |
| 2. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik | Rp. 7.812.354.000,- |
| 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS | Rp. 334.000.000,- |

Bandung, 17 Desember 2019

Kepala BPS Provinsi Jawa Barat

Kepala BPS Kabupaten Bandung

Ir. Dodv Herlando, M.Econ.
NIP. 19640726 198601 1 001

Ir. Ryslan
NIP. 19620109 198601 1 001

Lampiran 4. Rincian SDM ASN BPS Kabupaten Bandung akhir 2019

No.	Unit Organisasi	Jenjang Pendidikan						Total
		SMP	SMA	D3	DIV/S1	S2	S3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	Staf dan Struktural							
1	Kepala BPS Kabupaten				1			1
2	Subbag Tata Usaha		2	1	2			5
3	Seksi Statistik Sosial		1		1			2
4	Seksi Statistik Produksi		1			1		2
5	Seksi Statistik Distribusi				2	1		3
6	Seksi Nerwilis				1	1		2
7	Seksi IPDS		1	1	1	1		4
Sub Jumlah A		0	5	2	8	4	0	19
B	Petugas Lapangan							
1	Koordinator Statistik Kecamatan (KSK)		4	1	12			16
Sub Jumlah B		0	4	1	12	0	0	16
Jumlah Total		0	9	3	20	4	0	35

Lampiran 5. Jadwal Kegiatan Survei dan Pengolahan BPS Kabupaten Bandung 2019

No.	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Okt ober	November	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Statistik Sosial													
1	Updating Listing Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Semesteran	√											
2	Pencacahan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Semesteran		√						√				
3	Updating listing Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahunan							√					
4	Pencacahan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahunan								√				
5	Pencacahan Survei Pekerja Nasional Informal Nasional 2019		√										
6	Updating Blok Sensus Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2019		√										
7	Pencacahan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2019			√									
8	Updating Blok Sensus Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2019								√				
9	Pencacahan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2019									√			
10	Survei Statistik Polkam			√	√	√	√						
11	Pencacahan Survei Perilaku Anti Korupsi		√	√									

No.	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Okt ober	November	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	(SPAK) 2019												
12	Pendataan Potensi Desa (PODES2019- Desa)					√							
13	Pendataan Potensi Desa (PODES2019- Kecamatan)					√							
14	Pendataan Potensi Desa (PODES2019- Kabupaten)					√							
15	Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020				√	√							
Statistik Produksi													
1	Updating Direktori Industri Besar-Sedang (IBS)		√	√	√	√	√	√	√	√	√		
2	Survei Industri Besar-Sedang (IBS) Bulanan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Survei Industri Mikro Kecil (VIMK) Tahunan Listing										√		
4	Survei Industri Mikro Kecil (VIMK) Tahunan Pencacahan										√	√	
5	Survei Industri Mikro Kecil (VIMK) Triwulanan Listing			√									
6	Survei Industri Mikro Kecil (VIMK) Triwulanan Pencacahan				√			√			√		√
7	Survei Kerangka Sampel Area (KSA)					√	√	√	√				
8	Survei Peternakan dan Rumah Potong Hewan (RPH)				√			√			√		√
9	Survei Peternakan Tahunan (LTS)			√	√	√	√						
10	Survei Peternakan Tahunan (LTT)			√	√	√	√						

No.	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Okt ober	November	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Survei Peternakan Tahunan (LTU)			√	√	√	√						
12	Survei Tanaman Pangan/Ubinan Listing				√				√				√
13	Survei Tanaman Pangan/Ubinan Pencacahan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
14	Survei Hortikultura			√	√	√	√						
15	Survei Konstruksi Triwulanan				√			√			√		√
16	Survei SP-Lahan	√											
17	Survei SP- Benih	√											
18	Survei SP- Alsin	√											
19	Survei SP Padi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
20	Survei SP Palawija	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
21	Survei SPH-Lahan	√											
22	Survei SPH- SBS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
23	Survei SPH-BST				√			√			√		√
24	Survei SPH-TH				√			√			√		√
25	Survei SPH-TBF				√			√			√		√
26	Survei SPH-Benih	√											
27	Survei LITBANG							√	√	√			
28	SOUT (Survei Struktur Ongkos Usaha Pertanian)							√	√	√	√	√	
29	Survei Konversi Gabah (SKGB)		√	√	√	√	√	√	√				
30	Listing Survei Hortikultura Potensi (SHOPI)									√	√		
31	Pencacahan Survei Hortikultura Potensi (SHOPI)										√		
32	Survei Crumb Rubber Dan CPO								√	√	√		
33	Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) Listing					√							

No.	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Okt ober	November	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) Pencacahan					√	√						
35	Survei Kostruksi Tahunan				√	√	√	√	√	√	√	√	√
36	Updating Direktori Konstruksi				√	√	√	√	√	√	√	√	√
37	Survei Captive Power				√	√	√	√	√	√	√	√	√
38	Survei Penggalan Berbadan Hukum				√	√	√	√	√	√	√	√	√
39	Survei Penggalan Usaha Ruamahtangga (URT)				√	√	√	√	√	√	√	√	√
40	Survei Energi Listrik				√	√	√	√	√	√	√	√	√
Statistik Distribusi													
1	HPB / Harga Perdagangan Besar	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	HPB (Khusus Hari Raya, Natal & Tahun Baru)					√	√						√
3	IKK /Indeks Kemahalan Konstruksi	√			√			√			√		
4	SHPed /Harga Produsen Pedesaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5	SHPed /Harga Konsumen Pedesaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6	HPG /Monitoring Harga Produsen Gabah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
7	HPBG /Harga Beras di Penggilingan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
8	HP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9	HPJ	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
10	HPT	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
11	HP (Khusus Hari Raya, Natal & Tahun Baru)					√	√						√
12	Survei Keuangan TK II - APBD 2				√	√	√						
13	Survei Keuangan TK II - K2				√	√	√						

No.	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Okt ober	November	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	Survei Keuangan TK Desa - K3				√	√	√	√					
15	Survei Lembaga Keuangan								√	√	√		
16	VHT-L / Survei Hotel Tahunan							√	√	√	√		
17	VHT-S / Survei Tingkat Penghunan Kamar	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
18	PJ II-5		√	√	√								
19	AJR II-2		√	√	√								
20	AJR II-3		√	√	√								
21	STKU / Survei Triwulanan Kegiatan Usaha	√			√			√			√		
22	Survei Penyusunan Direktori Pasar & Pusat Perdagangan				√	√							
23	Survei Peningkatan Kualitas Data Ekspor				√	√							
24	PAW / Survei Perdagangan Antar Wilayah				√	√							
25	VREST/ Survei Usaha Restoran				√	√							
26	VDTW/ Survei Daya Tarik Wisata				√	√							
27	UPDATING POLDIS				√	√							
28	Poldis / Survei Pola Distribusi Perdagangan						√	√					
29	UPDATING SIP				√	√							
30	Survei SIP						√	√					
31	Survei BCS									√	√		
32	Survei profil pasar				√	√							
33	Survei e-commerce						√	√					
34	Wisnus ~ <i>Listing</i>				√			√			√		√
35	Wisnus ~ <i>Sampel</i>					√			√			√	
Neraca Wilayah dan Analisis Statistik													

No.	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Okt ober	November	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Penyusunan PDRB Menurut Lapangan Usaha				√	√	√	√	√				
2	Penyusunan PDRB Menurut Pengeluaran					√	√	√	√	√			
3	Penyusunan Statistik Daerah								√	√	√	√	
4	Penyusunan Inkesra											√	√
5	Survei Penyusunan Nilai Tambah Lapangan Usaha Barang Triwulanan (SKTNPB)				√			√			√		
6	Survei Implementasi SEEA dalam Sisnerling Indonesia			√	√	√	√						
7	SKPR Dinas Lapangan Usaha	√	√	√	√								
8	Survei Khusus Konsumsi Rumah Tangga Triwulanan (SKKRT)				√			√			√		√
9	Survei Khusus Lembaga Non Profit Triwulanan (SKLNPRT)				√			√			√		√
10	Survei Khusus Tabungan dan Investasi Rumah Tangga (SKTIR)				√	√	√	√					
11	Survei Khusus Lembaga Non Profit (SKLNP)			√	√	√	√	√					
12	Survei Khusus Perusahaan Swasta Non Finansial				√	√	√	√	√				
13	Pengumpulan data realisasi APBD	√			√			√			√		
14	Survei Khusus Studi Penyusunan Perubahan Inventori (SKSPPI)			√	√	√	√						
15	Survei Matriks Arus Komoditas (SMAK)				√	√	√	√					

No.	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Okt ober	November	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	SKPR Dinas PDRB Pengeluaran	√	√	√	√								
17	Survei Tendensi Konsumen (STK)			√			√			√			√
18	Survei Tendensi Konsumen (STB)			√			√			√			√
19	Survei Penyusunan Disagregasi PMTB Menurut Institusi dan Lapangan Usaha				√	√	√						
Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik													
1	Pengolahan Sakernas			√						√			
2	Pengolahan Susenas				√						√		
3	Pemutakhiran Peta Wilayah Kerja Statistik							√	√	√	√	√	√
4	Penyusunan DDA		√	√	√	√	√	√	√	√			
5	Penyusunan KCDA		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6	Pemutakhiran MFD		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
7	Pendataan SKD			√	√	√	√	√					
8	Pendataan Metadata				√	√	√	√	√	√	√	√	√

Lampiran 6. Target – Realisasi Kegiatan/*Response Rate* Survei dan Pengolahan BPS Kabupaten Bandung Tahun 2019

No.	Nama Survei/Sensus/Kegiatan dan Pengolahan	Satuan	Jumlah Target	Jumlah Realisasi	Realisasi/ Response Rate (%)
1	2	3	4	5	6
Statistik Sosial					
1	Updating Listing Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Semesteran	Dokumen	54	54	100
2	Pencacahan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Semesteran	Dokumen	540	540	100
3	Updating listing Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahunan	Dokumen	81	81	100
4	Pencacahan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahunan	Dokumen	810	810	100
5	Updating Blok Sensus Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2019	Dokumen	108	108	100
6	Pencacahan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2019	Dokumen	1.080	1.080	100
7	Updating Blok Sensus Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2019	Dokumen	27	27	100
8	Pencacahan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2019	Dokumen	270	270	100
9	Survei Statistik Polkam	Dokumen	7	7	100
10	Pencacahan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2019	Dokumen	160	160	100
11	Pendataan Potensi Desa (PODES2019- Desa)	Dokumen	280	280	100
12	Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat SP2020	Peta	10.757	10.757	100
Statistik Produksi					
1	Updating Direktori Industri Besar-Sedang (IBS)	Dokumen	1348	1348	100
2	Survei Industri Besar-Sedang (IBS) Bulanan	Dokumen	311	252	81,03

No.	Nama Survei/Sensus/Kegiatan dan Pengolahan	Satuan	Jumlah Target	Jumlah Realisasi	Realisasi/ Response Rate (%)
1	2	3	4	5	6
3	Survei Industri Mikro Kecil (VIMK) Tahunan Listing	Dokumen	74	74	100
4	Survei Industri Mikro Kecil (VIMK) Tahunan Pencacahan	Dokumen	533	533	100
5	Survei Industri Mikro Kecil (VIMK) Triwulanan Listing	Dokumen	36	36	100
6	Survei Industri Mikro Kecil (VIMK) Triwulanan Pencacahan	Dokumen	428	428	100
7	Survei Kerangka Sampel Area (KSA)	Dokumen	2388	2388	100
8	Survei Peternakan dan Rumah Potong Hewan (RPH)	Dokumen	60	60	100
9	Survei Peternakan Tahunan (LTS)	Dokumen	2	2	100
10	Survei Peternakan Tahunan (LTT)	Dokumen	5	5	100
11	Survei Peternakan Tahunan (LTU)	Dokumen	5	5	100
12	Survei Tanaman Pangan/Ubinan Listing	Dokumen	152	152	100
13	Survei Tanaman Pangan/Ubinan Pencacahan	Dokumen	564	251	44,50
14	Survei Hortikultura	Dokumen	3	3	100
15	Survei Konstruksi Triwulanan	Dokumen	9	4	44,44
16	Survei SP-Lahan	Dokumen	31	31	100
17	Survei SP- Benih	Dokumen	31	31	100
18	Survei SP- Alsin	Dokumen	31	31	100
19	Survei SP Padi	Dokumen	372	372	100
20	Survei SP Palawija	Dokumen	372	372	100
21	Survei SPH-Lahan	Dokumen	31	31	100
22	Survei SPH- SBS	Dokumen	372	372	100
23	Survei SPH-BST	Dokumen	124	124	100
24	Survei SPH-TH	Dokumen	124	124	100
25	Survei SPH-TBF	Dokumen	124	124	100
26	Survei SPH-Benih	Dokumen	31	31	100
27	Survei LITBANG	Dokumen	7	7	100
28	Listing Survei Hortikultura Potensi (SHOPI)	Dokumen	56	56	100
29	Pencacahan Survei Hortikultura Potensi (SHOPI)	Dokumen	560	560	100
30	Survei Crumb Rubber Dan CPO	Dokumen	1	1	100

No.	Nama Survei/Sensus/Kegiatan dan Pengolahan	Satuan	Jumlah Target	Jumlah Realisasi	Realisasi/ Response Rate (%)
1	2	3	4	5	6
31	Survei Kostruksi Tahunan	Dokumen	17	5	29,41
32	Updating Direktori Konstruksi	Dokumen	50	50	100
33	Survei Captive Power	Dokumen	28	18	64,28
34	Survei Penggalan Berbadan Hukum	Dokumen	13	6	64,29
35	Survei Penggalan Usaha Ruamahtangga (URT)	Dokumen	21	21	100
36	Survei Energi Listrik	Dokumen	4	2	50
Statistik Distribusi					
1	HPB / Harga Perdagangan Besar	Dokumen	264	264	100
2	HPB (Khusus Hari Raya, Natal & Tahun Baru)	Dokumen	18	18	100
3	IKK / Indeks Kemahalan Konstruksi	Dokumen	4	4	100
4	SHPed / Harga Produsen Pedesaan	Dokumen	108	108	100
5	SHPed / Harga Konsumen Pedesaan	Dokumen	72	72	100
6	HPG / Monitoring Harga Produsen Gabah	Dokumen	24	24	100
7	HPBG / Harga Beras di Penggilingan	Dokumen	70	70	100
8	HP	Dokumen	684	657	96,05
9	HPJ	Dokumen	24	24	100
10	HPT	Dokumen	24	24	100
11	HP (Khusus Hari Raya, Natal & Tahun Baru)	Dokumen	2	2	100
12	Survei Keuangan TK II - APBD 2	Dokumen	1	1	100
13	Survei Keuangan TK II - K2	Dokumen	1	1	100
14	Survei Keuangan TK Desa - K3	Dokumen	27	27	100
15	Survei Lembaga Keuangan -	Dokumen	36	33	91,67
16	VHT-L/ Suvei Hotel Tahunan	Dokumen	108	100	92,59
17	VHT-S / Survei Tingkat Penghunian Kamar	Dokumen	420	366	87,14
18	PJ II-5	Dokumen	1	1	100
19	AJR II-2	Dokumen	1	1	100
20	AJR II-3	Dokumen	1	1	100
21	STKU / Survei Triwulanan Kegiatan Usaha	Dokumen	40	32	80,00
22	Survei Penyusunan Direktori Pasar & Pusat Perdagangan	Dokumen	1	1	100
23	Survei Peningkatan Kualitas Data	Dokumen	2	2	100

No.	Nama Survei/Sensus/Kegiatan dan Pengolahan	Satuan	Jumlah Target	Jumlah Realisasi	Realisasi/ Response Rate (%)
1	2	3	4	5	6
	Ekspor				
24	PAW / Survei Perdagangan Antar Wilayah	Dokumen	24	24	100
25	VREST/ Survei Usaha Restoran	Dokumen	71	65	91,55
26	VDTW/ Survei Daya Tarik Wisata	Dokumen	81	75	92,59
27	UPDATING POLDIS	Perusahaan	282	282	100
28	Poldis / Survei Pola Distribusi Perdagangan	Dokumen	50	50	100
29	UPDATING SIP	Perusahaan	480	480	100
30	Survei SIP	Dokumen	55	55	100
31	Survei BCS	Dokumen	76	67	88,16
32	Survei profil pasar	Dokumen	30	30	100
33	Survei e-commerce	BS	90	90	100
34	Wisnus ~ Listing	Dokumen	108	108	100
35	Wisnus ~ Sampel	Dokumen	297	297	100
Neraca Wilayah dan Analisis Statistik					
1	Penyusunan PDRB Menurut Lapangan Usaha	Publikasi	1	1	100
2	Penyusunan PDRB Menurut Pengeluaran	Publikasi	1	1	100
3	Penyusunan Statistik Daerah	Publikasi	1	1	100
4	Penyusunan Inkesra	Publikasi	1	1	100
5	Survei Penyusunan Nilai Tambah Lapangan Usaha Barang Triwulanan (SKTNPB)	Dokumen	15	15	100
6	Survei Implementasi SEEA dalam Sisnerling Indonesia	Dokumen	4	4	100
7	Survei Khusus Pendapatan Regional Dinas Lapangan Usaha (SKPR Dinas LU)	Dokumen	14	14	100
8	Survei Khusus Konsumsi Rumah Tangga Triwulanan (SKKRT)	Dokumen	120	120	100
9	Survei Khusus Lembaga Non Profit Triwulanan (SKLNPR)	Dokumen	40	40	100
10	Survei Khusus Tabungan dan Investasi Rumah Tangga (SKTIR)	Dokumen	10	10	100
11	Survei Khusus Lembaga Non Profit (SKLNP)	Dokumen	6	6	100
12	Survei Khusus Perusahaan Swasta	Dokumen	6	6	100

No.	Nama Survei/Sensus/Kegiatan dan Pengolahan	Satuan	Jumlah Target	Jumlah Realisasi	Realisasi/ Response Rate (%)
1	2	3	4	5	6
	Non Finansial (SKPS)				
13	Pengumpulan data realisasi APBD	Dokumen	4	4	100
14	Survei Khusus Studi Penyusunan Perubahan Inventori (SKSPPI)	Dokumen	30	30	100
15	Survei Matriks Arus Komoditas (SMAK)	Dokumen	25	25	100
16	Survei Khusus Pendapatan Regional Dinas Pengeluaran (SKPR Dinas NP)	Dokumen	12	12	100
17	Survei Tendensi Konsumen (STK)	Dokumen	520	520	100
18	Survei Tendensi Konsumen (STB)	Dokumen	84	84	100
19	Survei Penyusunan Disagregasi PMTB Menurut Institusi dan Lapangan Usaha	Dokumen	128	128	100
Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik					
1	Pengolahan Sakernas	Dokumen	760	760	100
2	Pengolahan Susenas	Dokumen	1.350	1.350	100
3	Pemutakhiran Peta Wilayah Kerja Statistik	Peta	10.757	10.757	100
4	Penyusunan DDA	Publikasi	1	1	100
5	Penyusunan KCDA	Publikasi	31	31	100
6	Pemutakhiran MFD (Master File Desa)	Desa	280	280	100
7	Pendataan SKD (Survei Kebutuhan Data)	Dokumen	30	66	220
8	Pendataan Metadata	Dokumen	28	28	100

Lampiran 7. Judul Publikasi Yang Terbit Tahun 2019

No.	Judul Publikasi	Periode Terbit
1	Kabupaten Bandung Dalam Angka 2019	Tahunan
2	Statistik Daerah Kabupaten Bandung 2019	Tahunan
3	Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung 2019	Tahunan
4	Indeks Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung 2019	Tahunan
5	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha 2014-2018	Tahunan
6	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Usaha 2014-2018	Tahunan
7	Kecamatan Ciwidey Dalam Angka 2019	Tahunan
8	Kecamatan Rancabali Dalam Angka 2019	Tahunan
9	Kecamatan Pasirjambu Dalam Angka 2019	Tahunan
10	Kecamatan Cimaung Dalam Angka 2019	Tahunan
11	Kecamatan Pangalengan Dalam Angka 2019	Tahunan
12	Kecamatan Kertasari Dalam Angka 2019	Tahunan
13	Kecamatan Pacet Dalam Angka 2019	Tahunan
14	Kecamatan Ibum Dalam Angka 2019	Tahunan
15	Kecamatan Paseh Dalam Angka 2019	Tahunan
16	Kecamatan Cikancung Dalam Angka 2019	Tahunan
17	Kecamatan Cicalengka Dalam Angka 2019	Tahunan
18	Kecamatan Nagreg Dalam Angka 2019	Tahunan

No.	Judul Publikasi	Periode Terbit
19	Kecamatan Rancaekek Dalam Angka 2019	Tahunan
20	Kecamatan Majalaya Dalam Angka 2019	Tahunan
21	Kecamatan Solokan Jeruk Dalam Angka 2019	Tahunan
22	Kecamatan Ciparay Dalam Angka 2019	Tahunan
23	Kecamatan Baleendah Dalam Angka 2019	Tahunan
24	Kecamatan Arjasari Dalam Angka 2019	Tahunan
25	Kecamatan Banjaran Dalam Angka 2019	Tahunan
26	Kecamatan Canguang Dalam Angka 2019	Tahunan
27	Kecamatan Pameungpeuk Dalam Angka 2019	Tahunan
28	Kecamatan katapang Dalam Angka 2019	Tahunan
29	Kecamatan Soreang Dalam Angka 2019	Tahunan
30	Kecamatan Kutawaringin Dalam Angka 2019	Tahunan
31	Kecamatan Margaasih Dalam Angka 2019	Tahunan
32	Kecamatan Margahayu Dalam Angka 2019	Tahunan
33	Kecamatan Dayeuhkolot Dalam Angka 2019	Tahunan
34	Kecamatan Bojongsoang Dalam Angka 2019	Tahunan
35	Kecamatan Cileunyi Dalam Angka 2019	Tahunan
36	Kecamatan Cilengkrang Dalam Angka 2019	Tahunan
37	Kecamatan Cimenyan Dalam Angka 2019	Tahunan

Lampiran 8. Piagam Penghargaan yang diterima Tahun 2019

1. Piagam Penghargaan ***Peringkat ke-Empat Satker Terbaik Kategori DIPA Kecil Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA) Wilayah KKPN Bandung I dan KPPN Bandung II Semester II 2018*** dari Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat



2. Piagam Penghargaan ***Satker Terbaik Peringkat I Kategori DIPA Kecil berdasarkan Capaian Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA) Tahun 2018 Wilayah KKPN Bandung II*** dari KPPN Bandung II



3. Sertifikat Penghargaan **Satker Terbaik Peringkat ke-3 Pengelolaan ARC (Advance Release Calender) Publikasi dan Daerah Dalam Angka Tahun 2018 Tingkat Kabupaten/Kota se-Indonesia** dari Badan Pusat Statistik RI



4. Piagam Penghargaan **Apresiasi dan Penghargaan atas Partisipasi dengan Judul Film Factor X pada Indonesian Census Film Festival Tahun 2019 (ICFF2019)** dari

Badan Pusat Statistik RI



5. Piagam Penghargaan **BPS Kabupaten/Kota Terbaik Bidang Statistik Sosial Tahun 2019** dari BPS Provinsi Jawa Barat.



6. Piagam Penghargaan **BPS Kabupaten/Kota Terbaik Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Tahun 2019** dari BPS Provinsi Jawa Barat.



7. Piagam Penghargaan **BPS Kabupaten/Kota dengan Pengelolaan Administrasi Ketatausahaan Terbaik Tahun 2019** dari BPS Provinsi Jawa Barat.



8. Piagam Penghargaan **BPS Kabupaten/Kota dengan Pengelolaan Administrasi Ketatausahaan Terbaik Tahun 2019** dari BPS Provinsi Jawa Barat.



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BANDUNG**

Jalan Raya Soreang KM. 17 Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Soreang, Kabupaten Bandung 40911

Telp. 022 5895905, fax. 022 5880882, web bandungkab.bps.go.id,
email bps3204@bps.go.id